

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

06 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Inflasi Mei Terbaik bagi Kota Tangerang	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	7	
Author	Wid/Ant/G-1	

Data Survei | Penurunan Angka Inflasi Signifikan berbagai Sektor

Inflasi Mei Terbaik bagi Kota Tangerang

Beberapa komoditas penting yang menyumbangkan inflasi pada bulan Mei seperti bawang putih, telur ayam, jagung, sampai emas perhiasan.

TANGERANG - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) besaran inflasi bulan Mei Kota Tangerang berada di angka 2,95 persen. Angka ini merupakan yang terbaik dalam tiga bulan terakhir.

"Indeks inflasi bulan Mei menjadi catatan yang sangat positif untuk perekonomian lokal Kota Tangerang. Terlebih, berdasarkan perhitungan *month to month* dan *year to date*, tingkat inflasi keduanya sebesar -0,47 persen dan 1,36 persen," kata Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tangerang, Yeti Rohaeti di Tangerang, Rabu.

Dia menjelaskan indeks inflasi Kota Tangerang selama tiga terakhir yakni Maret di angka 3,62 persen, April di angka 3,36 persen dan Mei kembali turun mencapai 2,95

persen. Bahkan, indeks inflasi bulan Mei menjadi catatan terbaik dalam tiga bulan terakhir

"Berdasarkan data yang baru dirilis menunjukkan penurunan angka inflasi secara signifikan pada berbagai lini sektor. Bahkan Indeks Harga Konsumen bulan ini mencapai 105,94," ujar Yeti.

Tidak hanya itu, indeks inflasi Kota Tangerang juga menunjukkan kondisi yang lebih baik bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023).

Tercatat, perbandingan indeks inflasi pada periodisasi menjelang Idul Adha mencapai 0,47 persen, yakni Mei (2023) sebesar 3,42 dan Mei (2024) sebesar 2,95 persen.

Beberapa komoditas penting yang menyumbangkan inflasi pada bulan Mei seperti

bawang putih, telur ayam, jagung, sampai emas perhiasan. Sedangkan beberapa kebutuhan pangan pokok, seperti beras, cabai, tomat, kangkung, sampai bawang merah mengalami perkembangan deflasi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Pemerintah Kota Tangerang bersama Organisasi Perangkat Daerah terus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas indeks inflasi di Kota Tangerang dalam beberapa waktu mendatang," katanya.

Apresiasi

Sementara itu, penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin mengapresiasi penjualan produk UMKM dalam ajang Indonesia City Expo (ICE) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. "Menurut laporan hasil penjualan berbagai produk, telah mencapai 6,4 juta hanya di hari pertama selepas pembukaan," kata Nurdin.

Dia mengatakan ini usai meninjau *booth* UMKM Pe-

merintah Kota (Pemkot) Tangerang di ICE 2024 dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Rabu. Nurdin bersama sejumlah pejabat Pemkot Tangerang menghadiri sidang pleno sekaligus penutupan Rakernas Apeksi 2024 yang dilanjutkan dengan mengunjungi *booth-booth* UMKM dari berbagai kota dalam Indonesia City Expo (ICE) 2024

"*Booth* UMKM Kota Tangerang ramai pengunjung dan peminat. Tidak cuma berbelanja tapi juga banyak yang berswafoto di *booth* kita," ujarnya. Dia pun optimistis bahwa produk-produk UMKM Kota Tangerang dinilai sudah siap untuk naik kelas dan bersaing di pasar nasional bahkan global.

"Terlebih di ajang sebesar ICE ini, ada banyak hal serta inspirasi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang bisa menjadi sarana untuk studi banding agar kualitas dan produktivitas dari produk sekaligus pelaku UMKM.

■ wid/Ant/G-1

Tittle	Kementan Optimalkan Produksi Beras	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ant/E-10	

Kementan Optimalkan Produksi Beras

MALANG - Kementerian Pertanian (Kementan) mengoptimalkan upaya peningkatan produksi beras di tengah sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi dan berdampak pada penurunan produksi komoditas penting tersebut pada tahun lalu.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (5/6), mengatakan dampak kemarau panjang pada 2023, menurunkan produksi beras nasional.

“Produksi beras nasional pada 2023, turun signifikan. Tahun itu, produksi beras kita hanya 30,2 juta ton, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 31,5 juta ton,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan kebutuhan beras di dalam negeri per bulan, tercatat mencapai 2,6 juta ton beras atau setara dengan 5,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau area luas panen seluas satu juta hektare.

Menurutnya, berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, pada Maret dan April 2024, luas tanam di Indonesia kurang dari satu juta hektare. Luas tanam pada periode tersebut, tercatat hanya seluas 800-900 ribu hektare.

“Berarti, pada Juni ini, luas tanam kita tidak boleh kurang dari 1,1 juta hektare,” katanya.

Dia menambahkan dalam upaya untuk meningkatkan luas tanam tersebut, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah upaya dengan program strategis yakni optimalisasi lahan rawa, pompanisasi di lahan sawah tadah hujan dan tumpang sisis padi gogo di lahan perkebunan.

Untuk sawah tadah hujan, lanjutnya, hanya menanam padi satu kali dalam setahun akibat tidak adanya air saat musim kemarau. Kementerian Pertanian akan meningkatkan luas tanam dengan cara mengalirkan air dari air permukaan terdekat ke lokasi persawahan.

“Dari air permukaan, dialirkan ke sawah. Jadi, meskipun musim kemarau, dari tadinya yang tidak tanam menjadi tanam,” katanya. ■ **Ant/E-10**

Title	Kuota BBM Bersubsidi pada 2025 Diusulkan 19,99 Juta Kl	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ers/E-10	

Kebutuhan Energi Kuota BBM Bersubsidi pada 2025 Diusulkan 19,99 Juta Kl

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta kiloliter (kl).

Usulan tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta kl dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta kl. "Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta kl," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/6).

Arifin menjelaskan pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dengan pengendalian volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat. Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah, saat menentukan besaran subsidi tetap solar.

"Dalam RAPBN TA 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar 1.000 - 3.000 rupiah per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," kata Arifin.

Hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai 12.100 rupiah per liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar 6.800 rupiah per liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum. Karenanya, diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.

Arifin mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. "Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Disparitas Harga

Pada kesempatan sama, anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menyampaikan solar subsidi masih banyak disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan. Hal ini terjadi karena disparitas harga solar yang tinggi antara harga subsidi dan harga non-subsidi di pasaran. ■ **ers/E-10**

Title	Periksa Hewan di Ciganjur	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Koran Jakarta	

» Periksa Hewan di Ciganjur



KOMINFOTIK JAKARTA SELATAN

» Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan memeriksa hewan kurban, di Jalan Moh Kahfi I, Ciganjur, Jagakarsa, Rabu (5/6). Kasudin KPKP Jakarta Selatan, Hasudungan A Sidabalok, mengatakan, pemeriksaan untuk menjamin hewan terbebas penyakit.

Title	INISIATIF DARI MAGELANG MEMBENDUNG EFEK CUACA
Date	6 Juni 2024
Media	Bisnis Indonesia
Page	18
Author	M. Faisal Nur Ikhsan



| RISIKO INFLASI |

INISIATIF DARI MAGELANG MEMBENDUNG EFEK CUACA

Gerakan Petani Peduli Inflasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjadi sinyal positif soliditas antarpemangku kepentingan terkait guna meredam efek inflasi yang dapat ditimbulkan menyusul masuknya musim kemarau yang berisiko mengganggu produktivitas pertanian.

M. Faisal Nur Ikhsan
redaksi@bisnis.com

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sebetulnya boleh berbangga lantaran sejumlah strategi sepanjang tahun ini sukses meredam inflasi pangan pada Mei 2024. Akan tetapi, langkah itu tak boleh berhenti lantaran serangkaian tantangan yang diproyeksikan bakal mengerek laju inflasi pada beberapa bulan ke depan.

Musababnya, tak lain lantaran fenomena musim iduladha yang jatuh pada pertengahan bulan ini. Data historis menunjukkan tren

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada Mei 2024 makin terkendali lantaran sejumlah program-program yang mampu meredam gejala harga-harga pangan di pasaran.

Wilayah	Inflasi (%)
Cilacap	2,52
Purwokerto	2,4
Wonosobo	3,01
Wonogiri	2,57
Rembang	3,45
Kudus	2,67
Surakarta	2,94
Semarang	2,56
Tegal	2,54

Sumber: BPS Jateng
BISNIS/SINTA NOVIZAH



peningkatan kebutuhan masyarakat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim kemarau bakal jatuh pada periode Juni—September, dengan puncak musim kemarau pada Juli—Agustus sehingga berpotensi ikut memengaruhi produktivitas pertanian di Jawa Tengah.

Menyikapi tantangan tersebut, petani-petani cabai di Kabupaten Magelang ambil bagian dalam upaya pengendalian inflasi pangan. 1.360 petani ikut dalam Gerakan Petani Peduli Inflasi (GPPI) yang diresmikan pada Rabu (5/6).

"Kami sebagai petani ingin mengambil peran, walaupun gerakan kami hanya 1.000 orang, ataupun 2.000 orang, tetapi dampaknya dapat kita rasakan baik itu di daerah maupun nasional," kata Agus Wibowo, Ketua Koperasi Panca Arga Tani Gemilang Kabupaten Magelang.

Inisiatif tersebut disambut positif oleh Kementerian Pertanian. Bantuan berupa lahan seluas 2.800 hektare (ha) diserahkan dalam bentuk kawasan cabai kemitraan champion.

Nantinya, kawasan kemitraan tersebut bakal dikelola oleh pengiat Asosiasi Champion Cabai Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang. Gerakan tersebut secara tidak langsung ikut memitigasi potensi inflasi pangan Jawa Tengah dari sisi produksi.

Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Jawa Tengah Mei 2024 (%)

	Beras	0,57		Emas perhiasan	0,16
	Bawang merah	0,15		Bawang putih	0,13
				Sigaret kretek mesin	0,12

Jumlah Usaha Pertanian Jateng 2023

Subsektor	Perorangan	Badan Hukum	Lainnya
Tanaman Pangan	2.647.455	11	275
Hortikultura	1.972.883	56	612
Perkebunan	1.049.408	57	75
Peternakan	2.280.026	121	480
Perikanan	254.170	29	335
Kehutanan	1.045.592	39	32
Jasa Pertanian	61.185	3	940
Total Pertanian	4.363.708	285	2.324

Gerakan tersebut juga ikut menjaga pergerakan harga cabai yang selama ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar.

tervensi harga dari sisi distribusi dengan memangkas rantai pasok komoditas pangan. Gerai-gerai pengendali inflasi didirikan di berbagai wilayah.

Program tersebut pertama kali diinisiasi di Kota Semarang melalui Kios Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita).

Kios yang berlokasi di Pasar Kanjengan, Kota Semarang tersebut mendatangkan komoditas pangan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), juga Bulog, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan cara itu, beban biaya distribusi dari produsen ke konsumen bisa dipangkas.

Ndari menjelaskan bahwa keberhasilan Pandawa Kita telah direplikasi di tujuh wilayah. Gerai paling anyar berada di Kabupaten Magelang di mana pemerintah daerah setempat bahkan merencanakan untuk membuat tiga gerai yang dinamakan Toko Kendali Inflasi (Token).

"Jadi di kota-kota paman-tauan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu kita dorong untuk ada toko serupa. Jadi, yang in the pipeline itu ada di Kudus, Cilacap, Wonosobo, dan Tegal," tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Magelang, Sepyo

Achanto memandang, pendirian Token tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pemantauan dan pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang.

"Dengan ada Token ini otomatis [inflasi pangan dapat] terkendali. Namun tentunya, pengendalian ini jangan sampai mematikan pedagang yang ada," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk rutin melakukan pemantauan harga komoditas pangan.

"Ini butuh dipantau terus sehingga kita bisa melakukan upaya bagaimana menjaga inflasi kita dalam range yang kita inginkan," jelasnya.

Menurutnya, Jawa Tengah berada dalam posisi yang dilematis. Pasalnya, sebagai daerah penghasil pangan, kenaikan harga pangan memberikan dampak positif bagi petani sebagai produsen.

Namun demikian, imbuhnya, ketika terjadi penurunan harga seperti saat ini, konsumen juga diuntungkan dan dapat meningkatkan daya belinya.

"Kondisi ini perlu kita jaga agar kondisinya stabil dalam range yang sudah kita tetapkan. Karena kalau dari sisi pengukuran, dalam target indikator makro, ini sudah memikirkan secara komprehensif dari angka-angka ini. Kalau meleset dari target indikator makro, dampaknya akan kemana-mana. Jadi pertumbuhan ekonomi akan turun," jelas Sumarno.

Sumarno menambahkan bahwa fenomena deflasi yang terjadi di Jawa Tengah dan Indonesia pada Mei lalu tidak boleh mengurangi kewaspadaan akan lonjakan harga pangan.

"Ini beberapa bulan ke depan sudah memasuki musim kemarau, sehingga perlu perhatian kita bersama bahwa produk pertanian kita bisa terjaga dengan baik," katanya.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN

Title	Jalur Baru Nusantara-Baru	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	Nugroho Nafika Kassa	

| RUTE PELAYARAN |

Jalur Baru Nusantara–Barru

Bisnis, MAKASSAR — Rute pelayaran baru diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) guna mendukung kebutuhan logistik di Kalimantan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemprov Sulsel tengah mengupayakan rute pelayaran baru dari Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru ke beberapa wilayah di Kalimantan.

Jalur yang telah diusulkan a.l Garongkong—Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim); Garongkong—Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel); dan Garongkong—Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

“Saat ini, proposal pembukaan rute baru tersebut sisa diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” jelas Kepala Dinas Perhubung-

an Sulsel Andi Erwin Terwo, Rabu (5/6).

Dia mengungkapkan, Sulsel merupakan salah satu wilayah paling dekat dari IKN Nusantara dan memiliki potensi besar menjadi penopang ibu kota baru tersebut.

Sementara ini, imbuhnya, Kabupaten Barru menjadi daerah dengan akses paling terjangkau ke Pulau Borneo.

Oleh sebab itu, dia menilai, pengembangan rute baru ke beberapa pintu masuk Kalimantan melalui Pelabuhan Garongkong perlu dikembangkan guna memperbesar aliran distribusi logistik ke wilayah tersebut.

“Di antara semua daerah, Kabupaten Barru yang paling dekat dengan IKN Nusantara, makanya aksesnya perlu diperbanyak terutama ke Kalimantan. Kami optimistis Barru bisa maju dengan pesat dengan semua rencana

pembangunannya saat ini,” katanya.

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menambahkan wilayah ini sangat berpotensi memenuhi berbagai kebutuhan pangan di IKN Nusantara lantaran sumber daya pertanian wilayah ini yang melimpah.

Namun, imbuhnya, tantangannya ada pada sektor transportasi, terutama dalam pengiriman logistik ke Kalimantan.

“Ada begitu banyak kapal di Sulsel tidak mengalami perkembangan signifikan padahal tetap beroperasi. Makanya rute pelayaran harus ditambah untuk memaksimalkan potensi ini. Logistik harus dipastikan tak mengalami banyak kendala dan harus sesegera mungkin tiba di kota tujuan dengan cepat,” jelasnya. *(Nugroho*

Nafika Kassa)

Title	Kredit Produktif Akselerasi Ekonomi Bali	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	6	
Author	Harian Noris Saputra & Feri Kristiyanto	

| 62 TAHUN BPD BALI |

Kredit Produktif Akselerasi Ekonomi Bali

Harian Noris Saputra & Feri Kristiyanto
redaksi@bisnis.com

Besarnya porsi kredit sektor produktif PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah ini berperan aktif dalam menopang ekonomi Bali Kerthi guna menyejahterakan masyarakat Pulau Dewata.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Konsep Ekonomi Kerthi Bali bertujuan mewujudkan kemandirian Bali di bidang ekonomi. Salah satu penopang konsep ekonomi tersebut adalah pertumbuhan sektor produktif.

Pada 2023, BPD menyalurkan Rp21,15 triliun kredit atau tumbuh 5,39% secara tahunan (*year-on-year*/YoY).

Sepanjang tahun lalu, komposisi kredit produktif BPD Bali mencapai 54,34% dari total portofolio kredit per Desember 2023, capaian ini naik dari posisi per Desember 2022 yang hanya

52,52%.

Besarnya komposisi kredit produktif ini membuktikan konsistensi BPD Bali untuk mendorong dunia usaha terus bertumbuh.

Ditrus BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan, kinerja positif perseroan membuktikan kepercayaan masyarakat Bali terhadap bank ini masih terjaga dengan sangat baik.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen BPD Bali untuk terus berkarya membantu perekonomian Bali di usianya yang memasuki 62 tahun pada 2024.

"Capaian yang tecermin dari indikator keuangan ini memberi bukti bahwa BPD Bali masih menjadi bank yang dipercaya oleh masyarakat Bali dalam berbagai aspek kegiatan sehari-hari," jelas Sudharma dari keterangan resminya, dikutip Rabu (6/6).

Dia menjelaskan, porsi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BPD Bali sudah mencapai 48% atau melampaui target dari Bank Indonesia untuk perbankan hingga akhir tahun ini minimal sebesar 30%.

Pemenuhan rasio Bank Indonesia bersumber dari



Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma (kiri) didampingi Komisaris Utama Bank BPD Bali I Gusti Ngurah Bagus Artawan (kanan) berfoto bersama dengan pegawai yang memasuki masa pensiun dalam acara perayaan ulang tahun ke-62 tahun di Kantor Pusat Bank BPD Bali di Denpasar, Bali, Rabu (5/6).

tercapainya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 100% dari target, yaitu sebesar Rp1,72 triliun pada 2023.

Pada tahun ini, BPD Bali menargetkan bisa menyalurkan Rp1,8 triliun KUR ke pelaku UMKM.

Penyaluran KUR diyakini dapat menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif untuk mendorong permintaan domestik.

Selain konsisten menyalurkan KUR, BPD Bali juga menyalurkan pembiayaan murah melalui program Kredit

Kusuma atau Kredit Usaha Untuk Sejahtera, Unggul, dan Maju, yang ditujukan kepada pelaku usaha yang sudah tidak bisa mengakses KUR.

Adapun, program lain yang dapat diupayakan adalah mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi.

BPD Bali juga terus macu pembiayaan ke sektor pertanian melalui program Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSPT).

Untuk program ini, BPD Bali menyalurkan Kabupaten

Jembrana yang merupakan daerah yang memiliki lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terbesar di Pulau Dewata.

Sudharma menjelaskan, kinerja keuangan BPD Bali secara keseluruhan sangat positif.

Dia mencatat bahwa hingga kuartal I/2024 aset BPD Bali mencapai Rp35,86 triliun atau tumbuh 14,53% YoY.

Peningkatan aset ditopang oleh penempatan dana pihak ketiga (DPK) Rp30,69 triliun, atau naik 9,8% dibandingkan dengan posisi akhir 2023 (*year-to-date*/YtD). Dana murah atau *current account and saving account* (CASA) mencapai 69,37% dari total DPK.

Pada kuartal I/2024, BPD Bali mencatatkan laba bersih Rp270,53 miliar, atau tumbuh 35,96% YoY.

Adapun, pada Tahun Buku 2023, BPD Bali membagikan dividen Rp553,6 miliar dari laba bersih perusahaan senilai Rp738 miliar pada 2023.

Performa positif pada kuartal I/2024, diyakini bakal mendorong kinerja yang lebih *mancer* sepanjang tahun ini, sehingga pembagian dividen ke pemegang saham diharapkan bisa makin mengakselerasi pembangun-

an Bali yang lebih optimal.

Apalagi, kinerja kredit BPD Bali pada kuartal I/2024 juga masih cukup *prudent* dengan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*/NPL) yang terjaga di level 1,3%. Rasio kredit terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*/LDR) pun mencapai 69,69% pada kuartal I/2024. Kondisi itu menunjukkan bahwa ruang penyaluran kredit masih cukup besar untuk memompa performa BPD Bali sepanjang tahun ini.

"Bank BPD Bali juga tetap berhasil menjaga tingkat permodalan sesuai dengan ketentuan dari regulator dengan modal inti sebesar Rp3,79 triliun," ujarnya.

Prestasi BPD Bali juga tecermin dari raihannya berbagai penghargaan bergengsi skala nasional. Berdasarkan data *Bisnis Indonesia*, BPD Bali menjadi salah satu bank dengan aset lebih dari Rp30 triliun yang paling efisien.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi bank yang sahamnya dimiliki oleh sembilan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Bali itu tidak hanya fokus dengan perekonomian daerah, tetapi juga kinerja internal.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Waspada 'Digocek' Inflasi	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Bisnis Indonesia	

Waspada 'Digocek' Inflasi

Angka inflasi belakangan ini memang 'adem ayem'. Setidaknya realisasinya masih dalam rentang yang diharapkan Bank Indonesia dan pemerintah.

Terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pada Mei 2024, inflasi tercatat sebesar 2,84% secara tahunan. Angka itu tak lebih tinggi ketimbang realisasi pada Maret dan April yang berada di kisaran 3%.

Inflasi tahunan pada Mei dipicu kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yakni makanan, minuman, dan tembakau (6,18%), pakaian dan alas kaki (1,1%), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54%), perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,85%), kesehatan (2,06%), transportasi (1,34%); rekreasi, olahraga, dan budaya (1,6%), pendidikan (1,71%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,51%), serta kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,99%).

Adapun, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16%.

Menilik data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia melalui ragam kebijakan moneter berjalan mulus sejauh ini.

Demikian pula dengan sinergi antara bank sentral dan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang berdampak positif pada pengendalian inflasi. Selain tentu saja karena faktor telah berlalunya momen Ramadan dan Lebaran yang lazimnya terjadi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa.

Berkaca pada dinamika tersebut, wajar jika kemudian Bank Indonesia optimistis inflasi pada tahun ini dan tahun depan akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%.

Kendati demikian, sejatinya ada gelagat kurang baik yang perlu diwaspadai pemangku kepentingan yakni kenaikan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dalam setahun terakhir. Pada Mei 2023 IHPB tercatat sebesar 115,59 dan terus menanjak hingga menjadi 119,6 pada bulan yang sama tahun ini. Artinya, inflasi HPB tahun ke tahun mencapai 3,47%.

Hal itu perlu dicermati karena IHPB yang terus naik akan berujung pada kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Apalagi jika ditelaah lebih dalam, maka terlihat bahwa kenaikan IHPB terbesar terjadi pada sektor pertanian, sebesar 8,38%. Padahal sektor tersebut merupakan salah satu komponen yang amat sensitif menggerakkan inflasi.

Selain pertanian, BPS juga mencatat inflasi HPB sektor pertambangan dan penggalian 1,49%, serta sektor industri sebesar 2,39%.

Faktanya saat ini ada beragam

tantangan yang berisiko semakin mengerek IHPB, misalnya, risiko penurunan produktivitas panen karena risiko La Nina pada kuartal ketiga tahun ini. Risiko lainnya yang juga patut dicermati adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Maklum, mayoritas bahan baku dan penolong industri pengolahan atau manufaktur masih diimpor dan ditransaksikan dengan dolar. Dus, jika rupiah terus loyo, biaya produksi bakal menanjak yang lantas turut mengerek IHPB.

Menjadi tantangan besar bagi Bank Indonesia maupun pemerintah untuk bersinergi mengantisipasi berbagai risiko tersebut demi mengamankan inflasi. Demikian pula dengan penguatan daya beli masyarakat utamanya mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah melalui berbagai macam skenario, agar tak tumbang manakala inflasi meninggi. ■

Tittle	ANTRE DAPAT BANSOS	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Antara Foto/Anies Efizudin/Aww	



ANTRE DAPAT BANSOS:
Warga antre mendapatkan bantuan beras saat penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahap Lima 2024 di Kemloko, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog melanjutkan program bantuan pangan CPP, berupa beras 10 kilogram per bulan sampai Juni 2024, disalurkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia.

ANTARA FOTO/ANIES EFIZUDIN/AWW

Title	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KURBAN	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	PatraRizki Saputra/Rakyat Merdeka	



PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KURBAN:
Dokter hewan didampingi petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok saat melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin rutin kepada hewan kurban di kandang CV Puput Bersaudara, Rangakapan Jaya, Depok, Rabu (5/6/2024). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak disembelih.

PATRARIKZI SYAHPUTRA/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

Title	Areal Tanam Padi Ditargetkan Bertambah 2 Juta Hektare	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Tri Listiyarini	

Areal Tanam Padi Ditargetkan Bertambah 2 Juta Hektare

JAKARTA, ID—Kementerian Pertanian (Kementan) telah merealisasikan perluasan areal tanam (PAT) padi 349.801 hektare (ha) per 31 Mei 2024, atau 17,49% dari target seluas 2 juta ha. PAT dilakukan melalui kegiatan optimalisasi lahan (oplah) pada lahan rawa, pompanisasi di sawah tadah hujan, dan pemanfaatan kebun dengan tumpang sisip (lahan kering). PAT merupakan solusi cepat yang dijalankan Kementan untuk menjaga produksi padi saat musim kemarau tahun ini, di luar pertanaman pada lahan sawah reguler yang masuk pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Oleh **Tri Listiyarini**

PAT merupakan tindak lanjut dari terbitnya Kepmen- tan No 243/KPTS/ OT.050/M/04/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan tertanggal 1 April 2024 yang menyebutkan, dalam rangka antisipasi darurat pangan 2024 maka Kementan melakukan upaya penanggulangan dengan optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo. Per 31 Mei 2024, realisasi PAT telah mencapai 349.801 ha atau 17,49% dari target yang ditetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seluas 2 juta ha. Rinciannya, PAT dari oplah 35.188 ha (8,8% dari potensi lahan rawa 400 ribu ha), dari pompanisasi 276.381 ha (13,29% dari potensi lahan tadah hujan 2.080.052 ha), dan dari tumpang sisip padi gogo 38.232 ha (7,57% dari potensi lahan kering/kebun 504.734 ha).

Menurut Mentan Amran, kegiatan PAT harus terus didorong sebagai solusi cepat masa depan Indonesia dalam menghadapi potensi darurat pangan akibat terjadinya musim kering/kemarau sesuai prediksi BMKG yakni pada

Juni-Juli-Agustus tahun ini. Dengan upaya itu, produksi padi nasional terjaga dan swasembada diharapkan tercapai lagi. "Kami mendorong sepenuhnya upaya-upaya peningkatan produksi padi melalui PAT, di antaranya dengan pompanisasi," kata Mentan. Untuk lahan-lahan sawah reguler, peningkatan produksi padi melalui gerakan percepatan tanam. Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil menambahkan, PAT dilakukan guna mengejar keteringgalan produksi padi yang sempat turun akibat El Nino dan perubahan cuaca. Target PAT kian terlihat setelah pemerintah juga menambah alokasi pupuk menjadi 9,55 juta ton. "Nanti panen- nya antara Agustus-Septem- ber," ujar dia.

Di Sukabumi, Jawa Barat, misalnya, Kementan menar- getkan PAT hingga 6.522 ha melalui pompanisasi di 17 kecamatan, di antaranya Ciemas, Cibitung, dan Cida- dap. Pompanisasi di Ciemas dilakukan pada lahan 45 ha, nantinya rata-rata indeks per- tanaman (IP) atau tanam yang semula satu kali setahun men- jadi tiga kali setahun. Selain membantupompa, Kementan juga memperkuat ketersedi- aan benih dan pupuk. Dalam keterangan Kementan yang

Luas Panen dan Produksi Padi Indonesia

Periode	Luas Panen (Juta Hektare)	Produksi Padi (Juta Ton GKG)
2018	11,38	59,20
2019	10,68	54,60
2020	10,66	54,65
2021	10,41	54,42
2022	10,45	54,75
2023	10,21	53,98



dikutip Rabu (05/06/2024), potensi sawah tadah hujan di Sukabumi 17.599 ha dan PAT melalui pompanisasi sudah terealisasi 30,16% atau 5.307,86 ha. Pompanisasi juga dilakukan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di Kebumen, terdapat potensi sawah tadah hujan 14.054 ha dan kegiatan PAT melau- li pompanisasi ditargetkan

menjangkau 1.369,7 ha yang lokasinya tersebar di enam kecamatan, di antaranya Ke- camatan Puring 728 ha.

Kementan menargetkan bisa mencapai swasembada beras lagi. Karena itu, produk- si beras nasional dipatok 32 juta ton tahun ini dan 34 juta ton tahun depan. Dalam skenario pencapaian produksi beras 32 juta ton di 2024,

pada musim tanam pertama (MT-I) ditargetkan diperoleh 20 juta ton beras yang berasal dari 6,95 juta ha luas tanam atau 6,71 juta ha luas panen dengan 35 juta ton gabah ker- ing giling (GKG) dan di MT-II ditargetkan 12 juta ton beras yang berasal dari 4,2 juta ha luas tanam atau 4,05 juta ha luas panen dengan 21 juta ton GKG. Untuk produksi beras 2023, tidak berbeda jauh dengan kebutuhannya yang sebesar 30 juta ton. Alhasil, Indonesia pada tahun lalu harus mendatangkan sekitar 3,5 juta ton beras dari luar negeri guna memenuhi kon- sumsi domestik.

Solusi Permanen

Saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 4 Juni 2024, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementan Inti Pertiwi Nashawari menga- takan, PAT kedepan tidak hanya menjadi solusi cepat namun akan menjadi solusi permanen yang dijalankan Kementan saat kemarau tiba. Kegiatan itu menyasar selu- ruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia, sehingga peran serta gubernur dan bupati/walikota dalam men- jalankan PAT sangat penting. "Ini akan menjadi solusi per-

manen untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi saat kemarau, sasarannya adalah lahan rawa, tadah hujan, dan lahan kering. Kalau kita tidak tambah areal tanam saat kemarau, produksi akan stagnan dan muncul masalah defisit lagi," tutur Inti.

Inti Pertiwi menjelas- kan, lahan rawa, tadah hu- jan, dan lahan kering saat kemarau merupakan lahan tidak produktif karena tidak dimanfaatkan. Karenanya, apabila berhasil ditanami, luas tanam/luas panen dari lahan-lahan PAT itu menjadi tambahan di luar kegiatan pertanaman reguler yang biasanya dicatat oleh BPS. "Melalui PAT, lahan rawa yang tadinya IP satu kali satu tahun menjadi dua kali. Sawah tadah hujan yang tadinya saat kemarau IP satu kali maka dengan pompanisasi menjadi dua kali. Kami juga menyasar lahan-lahan kelapa dan kelapa sawit untuk ditumpang sisip dengan padi gogo, ini artinya yang tadinya IP nol menjadi IP satu kali setahun. Kapan panennya, PAT yang sekarang sudah tanam bisa panen nanti Agustus-September. Realisasi PAT ini baru 349.801 ha, an- gka ini terus bergerak, po- tensinya sendiri bisa 3 juta ha dan Pak Mentan menargetkan minimal 2 juta ha," jelas Inti.

Title	Program Susu Gratis Gairahkan Bisnis Ternak Sapi Perah	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

Program Susu Gratis Gairahkan Bisnis Ternak Sapi Perah

JAKARTA, ID—Dewan Persusuan Nasional (DPN) mendukung sepenuhnya realisasi Program Pembagian Susu Gratis (PPSG) yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) saat kampanye pilpres. DPN meyakini PPSG merupakan keberanian dan gebrakan politik yang bisa mendorong percepatan pengembangan peternakan sapi perah rakyat khususnya dan persusuan pada umumnya.

Memperingati Hari Susu Nusantara pada 1 Juni 2024, DPN menyampaikan harapan dan imbauan kepada pemerintah agar Hari Susu Nusantara (HSN) tahun ini mendapat perhatian khusus sebagai titik tolak untuk percepatan pembangunan dan pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Berkaitan dengan peringatan HSN 2024, DPN juga menyampaikan imbauan dan

usulan kepada presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, di antaranya dukungan penuh untuk PPSG. “Kami meyakini program susu gratis itu merupakan keberanian dan gebrakan politik yang dapat mendorong percepatan pengembangan peternakan sapi perah rakyat khususnya dan persusuan umumnya pada umumnya,” ungkap Ketua DPN Teguh Boediyana dalam keterangan yang dikutip Rabu (05/06/2024).

Berbagai indikator menunjukkan, saat ini, peternakan sapi perah rakyat yang diharapkan berperan dominan dalam memenuhi kebutuhan susu nasional masih jalan di tempat dan jauh tertinggal dari industri persusuan secara umum di Tanah Air. Peternakan sapi perah rakyat dalam kurun lebih dari 25 tahun dirasakan signifikan kurang berkembang. Hal itu utamanya setelah dicabutnya Inpres No 02 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan

Nasional pada awal 1998. Saat inpres itu dicabut pemberlakuannya, peternakan sapi perah rakyat tidak memiliki payung hukum yang memberi perlindungan kepada mereka untuk dapat berkembang. Indikator kasat mata yang menunjukkan peternakan sapi perah khususnya rakyat jalan di tempat antara lain produksi susu segar masih di bawah 1 juta ton per tahun, padahal kebutuhan nasional sekitar 4 juta ton setara susu segar per tahun.

Karena itu, DPN berharap nantinya presiden terpilih menerbitkan payung hukum sebagai pengganti Inpres No 02 Tahun 1985 agar lebih menjamin terwujudnya peternakan sapi perah rakyat yang maju dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi. Presiden dan wakil presiden baru juga harus memberi kesempatan peternak sapi perah dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka hasilkan. **(tl)**

Title	Rendem Tebu di PSN Merauke Diharapkan Menyamai Australia	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

Rendemen Tebu di PSN Merauke Diharapkan Menyamai Australia

JAKARTA, ID—Pemerintah menginginkan rendemen tebu di Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Merauke, Papua Selatan, bisa menyamai Australia sebesar 11-12%. Dengan rendemen tebu yang tinggi diharapkan produksi gula yang diperoleh juga besar sehingga bisa membantu Indonesia menekan impor. Di sisi lain, turut mewujudkan swasembada gula konsumsi nasional pada 2028 dan gula industri di 2030.

Pengembangan Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam merupakan PSN untuk mendukung percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol sebagai bahan bakar

nabati. Kawasan perkebunan yang dikelola PT Global Papua Abadi (GPA) itu mencakup wilayah seluas 506 hektare (ha) dengan nilai investasi Rp 53,8 triliun. Rencananya, lima pabrik gula (PG) dibangun di Merauke guna mengolah tebu yang mencakup lahan seluas 490 ribu ha dalam satu ekosistem rantai pasok. Untuk mendukung hal itu, GPA membangun fasilitas laboratorium di lokasi kebun pembibitan untuk menunjang riset dan kultur jaringan demi menghasilkan bibit tebu unggul dan berkualitas serta berfungsi sebagai pusat riset tebu.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mendukung Papua

Selatan menjadi salah satu pusat industri gula. Sebab, sejauh ini, kebutuhan gula nasional masih ditopang impor yang jumlahnya terus bertambah tiap tahun. Karenanya, pengembangan perkebunan tebu, khususnya di Merauke, diharapkan bisa berhasil, bahkan memiliki kadar gula (rendemen) di atas 11% seperti Australia. Australia sukses mengembangkan PG melalui penanaman tebu, rendemennya sudah sampai 11-12%. Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, rendemen tebu baru 6-7%. "Impor tiap tahun naik terus, bahkan di 2023 sampai 6 juta ton. Diperkirakan pada 2045 penduduk kita 300 juta orang, makin banyak

kita impor. Maka, kita ingin Merauke ini dikembangkan sebagai pusat pertanian dan perkebunan, termasuk tebu. Kalau (program) ini berhasil, ini (Merauke) akan menjadi lumbung (pangan), mengenai pertanian kita, perkebunan kita, di bidang salah satunya tebu, di samping juga beras," papar Ma'ruf Amin seperti dikutip dari situs resmi Wapres RI, Rabu (05/06/2024).

Pada 4 Juni 2024, usai meresmikan pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemprov Papua Selatan, Wapres Ma'ruf Amin berkunjung ke PSN Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kampung Ngguti Bob, Kecamatan

Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Relaksasi HET Gula

Pada bagian lain, seperti dikutip dari *Antara*, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) memperpanjang kebijakan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat retail atau konsumen hingga 30 Juni 2024 dari sebelumnya berlaku 5 April-31 Mei 2024. HAP di tingkat konsumen kini menjadi Rp 17.500 per kilogram (kg) dan khusus di timur Indonesia (termasuk daerah 3TP) Rp 18.500 per kg. Saat ini, Bapanas juga melaksanakan relaksasi harga acuan

pembelian (HAP) gula konsumsi di tingkat produsen menjadi Rp 14.500 per kg pada 3 Mei-31 Oktober 2024. "Relaksasi atau penyesuaian harga gula di tingkat konsumen yang berakhir 31 Mei 2024 diperpanjang sampai 30 Juni 2024," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Relaksasi harga gula di konsumen yang diperpanjang sampai 30 Juni 2024 itu akan dievaluasi berkala. Bapanas berharap Satgas Pangan Polri bersama-sama mengawasi kebijakan itu, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Hal itu guna memastikan implementasi relaksasi HAP gula konsumsi di tingkat produsen sesuai surat ketentuan. (td)

Title	Kekeringan Datang, Pompa Sawah Kurang	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	5	
Author	UL/HS/BB/YK/Z-11	

Kekeringan Datang, Pompa Sawah Kurang

KEMARAU sudah tiba dan kekeringan telah melanda sebagian sawah di beberapa daerah sentra padi. Sayangnya, bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) berupa pompa untuk membantu mengairi lahan masih belum dibagikan secara optimal.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sutatang mengatakan pompa air sudah diberikan pemerintah pusat. Namun, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan luasan sawah yang ada di daerah tersebut.

“Bantuan pompa air dari Kementan sudah diberikan ke petani, tetapi jumlahnya belum sebanding dengan luas areal sawah di Kabupaten Indramayu. Total luas sawah mencapai 125 ribu hektare. Sedangkan, Kementan hanya memberikan 200 unit pompa,” ujar Sutatang di Indramayu, kemarin.

Jika bantuan tidak ditambah, petani terpaksa menyewa secara kelompok dan itu tentu akan membebani biaya produksi.

“Petani bahkan harus membeli bahan bakar untuk menghidupkan pompa sehingga pengeluaran pasti bertambah,” jelas Sutatang.

Ia pun berharap Kementan bisa menambah bantuan pompa kepada para petani untuk mengurangi beban pengeluaran mereka.

Di Sidoarjo, tepatnya di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Jawa Timur, 120 hektare lahan pertanian telah mengalami kekeringan. Padi-padi yang sudah ditanam pun

terancam gagal panen. Para petani berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah dan Kementan mengenai situasi buruk tersebut. Kepala Desa Kupang Mukhamad mengaku sudah menyuarakan perihal kekeringan kepada ke dinas terkait.

“Kondisi persawahan Desa Kupang sudah sangat genting. Mohon pemerintah daerah dan dinas terkait segera membantu mengatasi kekeringan lahan ini,” kata Mukhamad.

Di Gresik, ratusan hektare sawah hampir dipastikan gagal panen. Para petani pun membabat padi-padi yang sudah ditanam untuk pakan ternak.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebut Kementan harus melakukan langkah-langkah mitigasi serius untuk mengantisipasi dampak buruk akibat kekeringan. Manajemen pengelolaan dan ketersediaan air di daerah harus betul-betul diperhatikan. Program pengadaan pompa, ucapnya, harus didukung ketersediaan air yang mencukupi. Jangan sampai, pompa diberikan tetapi air tidak tersedia.

Sementara itu, Kementan mengklaim program pemberian pompa air di beberapa daerah sudah berjalan baik. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, program tersebut sudah menjangkau 17 kecamatan dengan total luas lahan mencapai 6.522 hektare. (UL/HS/BB/YK/Z-11)

Di Gresik, ratusan hektare sawah hampir dipastikan gagal panen. Para petani pun membabat padi-padi yang sudah ditanam untuk pakan ternak.

Title	Permintaan Sapi Mulai Melonjak	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	5	
Author	UL/RF/AD/MY/Z-11	

Permintaan Sapi Mulai Melonjak

KURANG dari dua pekan menjelang Idul Adha, kelompok ternak sapi di Cirebon, Jawa Barat, mulai kebanjiran pesanan. Kelompok Tani Ternak Sapi (KTTS) Padusan, Desa Kubang, Kecamatan Talun, mengaku stok sapi yang dimiliki semakin tipis. Dari total 200 ekor yang diujakan, hanya tersisa 10 yang belum terjual.

Anggota KTTS Padusan, Yuwenda, mengatakan para pembeli berasal dari berbagai daerah. Bahkan, ada pemesan yang datang dari luar Cirebon.

Untuk harga jual, pihaknya menawarkan mulai dari Rp25 juta per ekor hingga Rp 83 juta per ekor.

Meski nyaris terjual semua, Yuwenda mengatakan penjualan tahun ini masih belum seramai tahun lalu. "Tahun lalu kami jual sampai 300 ekor sapi," tuturnya.

Hal senada terjadi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Rangga, distributor sapi yang berlokasi di Jalan Ketapang, mengatakan pesanan mulai ramai memasuki dua pekan jelang Idul Adha. Saat ini, ia mencatat sudah 350 ekor terjual. Untuk tahun ini, Rangga menargetkan bisa menjual 500 ekor sapi.

"Harga tidak ada kenaikan signifikan, masih sama seperti tahun lalu, di kisaran Rp19 juta

"Harga tidak ada kenaikan signifikan, masih sama seperti tahun lalu, di kisaran Rp19 juta hingga Rp85 juta."

Rangga

Distributor Sapi

hingga Rp85 juta, tergantung jenis sapi," tuturnya.

Berbeda di Tasikmalaya, Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengatakan penjualan hewan kurban di wilayah tersebut masih rendah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Keta-

hanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya Adang Mulyana mengatakan itu terjadi karena ada kekhawatiran masyarakat terkait penyakit pada hewan ternak.

"Penjualan hewan kurban sekarang ini masih kurang karena ada dampak dari penyakit mulut dan kuku (PMK) termasuknya *lumpy skin disease* (LSD). Meski hampir di setiap pedagang yang kami periksa tidak ada penyakit tersebut, masyarakat masih menahan diri," ucap Adang.

Ia pun memastikan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap seluruh hewan ternak yang dijual di Tasikmalaya. Dokter-dokter hewan telah dikerahkan untuk memeriksa kondisi dan kelengkapan dokumen kesehatan hewan ternak. (UL/RF/AD/MY/Z-11)

Title	PLN Diminta Ganti Rugi Blackout Sumatra	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	5	
Author	Yose Hendra	



PEMADAMAN LISTRIK DI RIAU: Warga membeli mesin genset menyusul terjadinya pemadaman listrik di Kota Dumai, Riau, kemarin. Pemadam listrik terjadi di wilayah Riau sejak Selasa (4/6) akibat gangguan pada jaringan saluran utama tegangan ekstra tinggi (SUTET) 275 kV Linggau-Lahat Sumsel. Saat ini petugas PLN masih melakukan pemulihan dari sisi pembangkit, transmisi, dan distribusi.

PLN Diminta Ganti Rugi Blackout Sumatra

PLN S2JB mencatat sekitar 4,3 juta pelanggan terdampak oleh pemadaman total akibat gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat.

YOSE HENDRA
yose@mediaindonesia.com

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi yang sesuai kepada masyarakat yang menjadi korban pemadaman listrik total atau *blackout* di Sumatra.

Ganti rugi harus diberikan karena pemadaman total pasti menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan di masyarakat, khususnya di sektor bisnis dan industri.

"PLN harus memberikan kompensasi sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait dengan ting-

kat mutu pelayanan yang dimandatkan pemerintah," tegas Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, kemarin.

Ia juga mendesak perseroan untuk memperbaiki manajemen mitigasi. Dengan sumber daya yang begitu besar, PLN semestinya memiliki langkah-langkah antisipasi terkait dengan masalah tersebut.

"PLN juga harus segera menemukan penyebab terjadinya pemadaman listrik total di sebagian Sumatra. Jika penyebab sudah ditemukan, itu harus segera diumumkan secara terbuka kepada publik," ucap Tulus.

Sedang dihitung

Saat menanggapi desakan tersebut, Manajer Komunikasi dan

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) Iwan Arisetyadhi mengatakan perihal kompensasi itu pasti akan ditangani pihak perusahaan dan saat ini dalam tahap pembahasan.

"Terkait dengan kompensasi, itu akan ditentukan konsepnya oleh perusahaan. Kami sebagai pihak UID hanya berfokus pada pemulihan sistem kelistrikan," jelas Iwan.

Ia mengatakan pihaknya masih meneliti penyebab utama gangguan transmisi SUTT 275 kV Lubuklinggau-Lahat yang menyebabkan *blackout* Sumatra. Sambil mencari penyebab, upaya pemulihan sistem kelistrikan juga dilakukan, terutama pada fasilitas pelayanan publik.

"Kami berkoordinasi dengan semua pihak pemangku kepentingan dalam pemulihan sistem kelistrikan pada fasilitas pelaya-

nan publik, rumah sakit, dan layanan transportasi umum seperti LRT Sumsel. Pemulihan sistem kelistrikan ini kami lakukan secara bertahap," tuturnya.

PLN S2JB mencatat sekitar 4,3 juta pelanggan terdampak oleh pemadaman total akibat gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat. Namun, dari jumlah tersebut, mereka mengklaim 80% sudah kembali normal.

"Masih ada 20% atau hampir 1 juta pelanggan yang masih dalam proses, dan kami pastikan segera normal," ucap Iwan.

Sementara itu, PLN UP3 Bengkulu mengungkapkan listrik di sejumlah wilayah di Kota Bengkulu masih padam hingga kemarin sore.

"Di Kota Bengkulu yang masih padam aliran listriknya yaitu sepanjang kawasan pantai, wilayah Pulau Baai, Bumiayu, dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Saat *blackout* kemarin,

Bengkulu hampir 100% padam dan kami belum bisa pastikan kapan pulih sepenuhnya," papar Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Cabang Bengkulu Reza Oktadinata.

General Manager PLN UID Sumatra Barat Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan ada 600 ribu pelanggan yang terdampak oleh pemadaman total di wilayah tersebut. Pihaknya telah menyusuri sekitar 90 kilometer jalur untuk memeriksa kelistrikan secara detail.

Terkait dengan kompensasi, ia memastikan akan ada potongan harga hingga 10% kepada pelanggan yang terdampak oleh *blackout*. Kompensasi pengurangan biaya beban akan diberlakukan pada bulan berikutnya.

"Kompensasi diberikan jika listrik padam lebih dari 8 jam. Jadi, *blackout* ini kita berikan kompensasi potongan 10%," tandasnya. (RF/RK/Z-11)

Title	Bapanas accuses garlic importers of license abuse	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	The Jakarta Post	
Page	4	
Author	Deni Ghifari	

Bapanas accuses garlic importers of license abuse

Deni Ghifari

The Jakarta Post/Jakarta

The National Food Agency (Bapanas) has accused garlic importers of trading quotas among themselves and causing a domestic shortage by not importing enough of the staple food.

Bapanas chief secretary Sarwo Edhy said the import volume of garlic to date had not reached even half of the Trade Ministry's 349,290-tonne quota issued to date, or a quarter of the government's full-year target of 665,025 to meet domestic demand.

"We received reports that many importers who had received quotas [are] selling [their quotas] to other companies. This caused delays in [import realization], and we need to anticipate" its impact on the market, Sarwo said on Tuesday, as quoted by *Kompas.com*.

As of Monday, the garlic import volume stood at 162,139 tonnes, or 46.42 percent of the import quota issued, *Bisnis.com* reported, citing Trade Ministry data.

Sarwo expressed hope that the government and stakeholders would swiftly summon the recalcitrant importers and press them on the issue, as a supply shortage could cause the commodity's local prices to jump.

Bapanas' food price portal shows that the price of garlic increased 16.5 percent to Rp 42,560 in June, from Rp 36,520 (US\$2.25) per kilogram in December, while the commodity's price has risen 1.35 percent



Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Essential seasoning: A seller caters a customer buying garlicks during a cheap food bazaar in Denpasar, Bali, on May 30. As of Monday, the garlic import volume stood at 162,139 tonnes, or 46.42 percent of the import quota issued, according to Trade Ministry data.

month-over-month, according to Statistics Indonesia (BPS).

Edy Priyono, a deputy at the Executive Office of the President, recommended sanctioning authorized garlic importers that did not meet their quotas.

"A sanction is not always [legal] punishment. It can be an administrative sanction. At the very least, they will not be granted any more import permits because this is a breach of contract, they were given import permits but did not [fulfill the terms]," he said on Tuesday, as quoted by *Bisnis.com*.

Edy added that sanctioning the noncompliant importers was necessary to avoid them setting up new companies next year to apply for new permits. He also

urged the Trade Ministry to issue the remaining import permits to match the year's target for garlic.

Home Minister Tito Karnavian remarked that the spike in local garlic prices was not caused by high prices in source countries, rather that it was due to bad governance leading to a domestic shortage.

"The main problem regarding garlic has been identified. It is not because the price is high in China, but because domestically, our management is bad," Tito said on Tuesday, as quoted by *Kompas.com*.

BPS data show that China was the sole source of garlic imports to Indonesia until March, exporting 65,047 tonnes of the commodity in the quarter.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Feeling salty	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	The Jakarta Post	
Page	4	
Author	Antara/Basri Marzuki	

Feeling salty



Antara/Basri Marzuki

Workers unload sacks of salt off a truck in Palu, Central Sulawesi, on Wednesday. Traders in Palu decided to buy salt from Makassar, South Sulawesi, to fulfill the local demand. Local salt producers in the area faced difficulties to meet their regular target as they were challenged by bad weather.

Title	Handle with care	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	The Jakarta Post	
Page	5	
Author	AFP	

Handle with care



AFP

An employee works at a seedling nursery in Lianyungang, in eastern Jiangsu province, China, on Wednesday. China's first food security law aimed at achieving "absolute self-sufficiency" in staple grains came into effect on Saturday, reinforcing efforts by the world's biggest agriculture importer to lower its reliance on overseas purchases.

Title	BPS Kaji Alat Ukur Baru untuk Deteksi Kesejahteraan Petani	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	9	
Author	AGP/HEN	

PERTANIAN

BPS Kaji Alat Ukur Baru untuk Deteksi Kesejahteraan Petani

JAKARTA, KOMPAS—Badan Pusat Statistik atau BPS menilai nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan kesejahteraan petani dan nelayan. Oleh karena itu, BPS akan memberikan alternatif pengukuran kesejahteraan petani dengan membuat Indeks Kesejahteraan Petani.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (5/6/2024), mengatakan, pada dasarnya, NTP dan NTN bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP dan NTN hanya mengukur perubahan harga yang diterima dan yang dibayar oleh petani.

Dengan kata lain, NTP dan NTN tidak mencerminkan kua-

litas hidup petani yang dipengaruhi berbagai dimensi kehidupan, bukan hanya harga. Karena itu, BPS akan memberikan alternatif pengukuran dengan pendekatan multidimensi melalui Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

"Saat ini, kami tengah mengkaji IKP tersebut. IKP akan menunjukkan kesejahteraan petani di tiap subsektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, serta perikanan budidaya dan tangkap," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah di Jakarta.

Pada tahun lalu, BPS telah memulai Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2023. Survei itu digelar untuk mendapatkan indikator kesejahteraan petani

dengan memperlihatkan aspek multidimensi yang mencakup pendapatan dan sumber daya, pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan dan gizi, serta mitigasi risiko.

Merujuk pada definisi NTP yang disarikan dari laman BPS, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun untuk biaya produksi.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPID) dan Komite Pendayagunaan Pertanian

(KPP), Khudori, dalam artikelnya di harian *Kompas* bertajuk "Mengukur Kesejahteraan Petani", menyebutkan, apabila ditelaah formulanya, NTP hanya membandingkan harga-harga, bukan pendapatan dan biaya hidup petani. NTP tidak menggambarkan nilai kesejahteraan laba bersih usaha tani.

Guna memperoleh ukuran atau indikator yang lebih representatif, seharusnya digunakan formula yang dapat menghitung keuntungan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Tidak bisa sekadar membandingkan harga komoditas yang dijual dengan harga komoditas yang dibeli petani.

Dalam konteks mengukur capaian target pembangunan kesejahteraan petani dan nelayan,

kata Khudori, lebih masuk akal jika menggunakan ukuran petani skala kecil sebagai indikator. Jika tidak memakai ukuran petani skala kecil, bisa dikembangkan indikator lain, yakni mengkaji ulang cara penghitungan dan penyajian NTP (*Kompas*, 11/8/2023).

Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I yang dirilis pada 4 Desember 2023 menunjukkan, jumlah petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Sementara itu, porsi rumah tangga atau petani pemilik lahan di bawah 0,5 hektar itu terhadap total rumah tangga petani di Indonesia meningkat dari 55,33 persen jadi 60,84 persen. (AGP/HEN)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Karpet Merah untuk Pangan Gratis	
Date	6 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	9	
Author	HENDRIYO WIDI	

TRANSISI PEMERINTAHAN

Karpet Merah untuk Pangan Gratis

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menyiapkan karpet merah bagi program pangan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 terpilih. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis dan Minum Susu Gratis.

Program itu merupakan salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran. Program itu menasar 82,9 juta penerima, yakni pelajar, santri, anak balita, dan ibu hamil. Kedua program diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 1 juta ton daging ikan, 500.000 ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter susu sapi per tahun.

Semula, program itu membutuhkan dana Rp 450 triliun per tahun. Namun, dalam pelaksanaannya akan diupayakan bisa dihemat jadi Rp 225 triliun per tahun. Di sisi lain, butuh anggaran Rp 90 triliun untuk mengimpor minimal 1,1 juta ekor sapi perah guna menambah pasokan susu.

Terlepas dari pendanaan, program itu mulai disiapkan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Persiapan itu mulai dari simulasi program, perencanaan pemenuhan kebutuhan susu nasional, hingga peninjauan kemitraan dengan negara lain dan perguruan tinggi nasional. Investasi dari negara lain diincar agar tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Guna penyediaan susu, Kementan memiliki program Peningkatan Produksi Susu Sapi Nasional (PPSN). Program PPSN dinilai perlu karena program tersebut bakal memperlebar defisit neraca produksi-konsumsi susu nasional.

Rerata kebutuhan susu tahunan akan bertambah dari 4,6 juta ton menjadi 8,7 juta ton. Dengan rerata produksi susu tahunan 0,9 juta ton, defisit susu akan mencapai 7,8 juta ton atau setara 2 juta sapi perah. Tanpa program itu, defisit susu mencapai 3,9 juta ton.

Merujuk data program PPSN, sapi perah yang akan diimpor 2,15 juta ekor. Sapi-sapi itu akan didatangkan dari Brasil sebanyak 1,5 juta ekor, terutama sapi perah tropis; Amerika Serikat 500.000 ekor; Australia 100.000 ekor; dan Selandia Baru 50.000 ekor.

Dari jumlah itu, sapi impor yang dibutuhkan untuk program Minum Susu Gratis 1,1 juta ekor. Total dana yang diperlukan untuk mendatangkannya sekitar Rp 90 triliun.

Mitra mancanegara

Pemerintah juga menjajaki kemitraan dengan negara lain. Pada Selasa (4/6/2024), Indonesia-Uruguay menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama pembangunan pangan, khususnya di bidang peternakan untuk mengembangkan produksi daging dan susu berkualitas.

Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi dan Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan Uruguay Fernando Mattes. Dalam kerja sama itu, Indonesia juga mengincar transfer teknologi pertanian dan peternakan.

Menurut Harvick, Kementan bergerak sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih untuk meningkatkan kinerja sektor pangan. "Kami tidak hanya fokus swasembada daging, tetapi juga swasembada protein hewani, termasuk ternak sapi perah penghasil susu," ujarnya.

Sebelumnya pada 19-22 Mei 2024, Bapanas bersama bersama Komisi IV DPR berkunjung ke Stockholm, Swedia. Kunjungan itu dalam rangka menjajaki kerja sama pengembangan sistem budidaya dan pengelolaan pangan terintegrasi, termasuk di sektor peternakan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan dengan Swedia adalah *joint operation/joint venture*. Skema itu memungkinkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan peternakan sapi.

Selain itu, Indonesia bisa mempelajari pola *free-range* yang dikembangkan peternakan sapi di Bona-Munsö, Stockholm. Pola itu merupakan salah satu alternatif sistem pemeliharaan ternak yang memadukan antara kandang dan padang penggembalaan.

Pada 30 April 2024, Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands MP di London. Dalam pertemuan itu, Hands mengeluhkan lambatnya pendaftaran produk susu dan turunannya, serta penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi.

Merespons hal itu, Airlangga menyatakan, Indonesia sedang menderegulasi pendaftaran produk susu dan turunannya. Deregulasi itu bakal menekankan kemudahan mekanisme pendaftaran produk susu dan turunannya.

Di samping menjajaki peluang kerja sama dengan negara lain, pemerintah juga bakal menggandeng perguruan tinggi, peternak sapi, dan pelaku industri susu di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menyatakan, defisit neraca susu membuka peluang investasi pengembangan usaha sapi yang melibatkan peternak lokal dengan industri pengolah susu.

"Saat ini baru 32 industri pengolah susu di Indonesia. Sebanyak 14 di antaranya telah bermitra dengan peternak sapi perah lokal untuk menyerap susu segar," kata Nasrullah.

Selain itu, pengembangan usaha sapi tersebut juga perlu ditopang dengan berbagai riset. Ini berarti membuka peluang kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi nasional. (HENDRIYO WIDI)

Kami tidak hanya fokus swasembada daging, tetapi juga swasembada protein hewani, termasuk ternak sapi perah penghasil susu.

Harvick Hasnul Qolbi

Title	Kementan Latih Jutaan Petani dan Penyuluh	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Palembang Pos	
Page	8	
Author	Ant	

Kementan Latih Jutaan Petani dan Penyuluh

Antisipasi Darurat Pangan

MALANG - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan pelatihan kepada jutaan petani dan penyuluh untuk mengantisipasi kondisi darurat pangan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan, langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan akibat situasi dunia saat ini dalam kondisi tidak menentu.

"Dari berbagai ma-

salah, berdampak produksi pangan global terganggu. Di Indonesia, sejak Februari 2023 hingga Maret 2024, kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, sejak 2023 dampak dari pandemi penyakit akibat penyebaran virus Corona atau COVID-19, perang Rusia dan Ukraina, serta perubahan iklim, memberikan dampak pada kondisi pangan global.

Menurut dia, dengan kondisi yang tidak menentu tersebut, ada kurang lebih 60 negara yang mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak. Oleh karena itu, pelatihan

bagi petani, penyuluh dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) perlu dilakukan.

"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi," katanya.

Dedi menambahkan, total peserta yang mengikuti pelatihan tersebut mencapai 1.902.354 orang dari target yang dicanangkan sebanyak 1.800.000 orang. Pelatihan itu diberikan kepada petani sebanyak 1.823.948 orang dan Penyuluh Pegawai Neg-

eri Sipil (PNS) sejumlah 12.008 orang.

Kemudian, lanjutnya, Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 7.690 orang, Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) Pusat 474 orang, Penyuluh THL Daerah 3.184 orang, Babinsa 48.347 orang dan Insan Pertanian lainnya sejumlah 6.703 orang.

Pelatihan yang digelar di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan secara daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten kota, Balai Penyuluhan Pertanian dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia berlangsung pada 5-7 Juni 2024. **(ant)**

Title	Petani Diminta Waspada Kekeringan	
Date	6 Juni 2024	
Media	Kabar Banten	
Page	9	
Author	Ant/H-45	

Petani Diminta Waspada Kekeringan

SUKABUMI, (KB).-
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengimbau seluruh petani di Pulau Jawa untuk mewaspadaai bencana kekeringan yang dipicu musim kemarau yang berbarengan dengan fenomena alam El Nino.

"Pada Juni ini Pulau Jawa sudah masuk musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tentunya ini bisa memicu bencana kekeringan yang akan berdampak besar terhadap produksi pangan," katanya saat panen raya jagung dan singkong bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak di Desa Neglasari, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Selasa (4/6/2024).

Menurut Amran, Pulau Jawa merupakan daerah yang paling pertama terkena dampak kemarau dan El Nino sesuai prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Maka dari itu, baik pemerintah, petani, masyarakat dan pemangku kepentingan harus mewaspadaai terjadinya bencana kekeringan sejak dini. Jika musim kemarau panjang ditambah dengan El Nino maka bencana kekeringan bisa berdampak besar.

Selain itu, dampak yang paling dikhawatirkan jika bencana kekeringan melanda seluruh daerah yang ada di Pulau Jawa maka produksi pangan dipastikan akan menurun, persediaan menjadi menipis dan memicu terjadinya kenaikan harga.

Untuk itu, perlu adanya kerja sama dengan seluruh pihak untuk melakukan antisipasi sehingga dampak bencana kekeringan terhadap aktivitas pertanian bisa ditekan agar produksi dan persedi-



MENTAN RI Amran Sulaiman saat memberikan bantuan secara simbolis kepada petani yang berada di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Selasa (4/6/2024).*

aan pangan terjaga.

Pihaknya pun mengapresiasi Program Ketahanan Pangan yang digagas oleh KSAD Maruli Simanjuntak di Desa Neglasari ini. Di mana lokasi untuk melaksanakan program tersebut awalnya merupakan lahan tidur, semak belukar dan minim persediaan air.

Tetapi dengan jerih payah perwira tinggi di TNI AD itu, sejak dari pangkat kolonel hingga jenderal bintang em-

pat berhasil menciptakan program ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi dan mampu mengubah lahan yang sama sekali tidak menghasilkan menjadi produktif. Ditambah lokasi lahan itu berada di medan yang berat.

"Program Ketahanan Pangan melalui inovasi pertanian dan kreativitas dari rekan-rekan TNI AD merupakan proyek percontohan di daerah lain agar produksi pangan tetap terja-

ga sepanjang tahun," ucapnya.

Amran mengatakan, inovasi pertanian ini tentunya harus dicontoh agar petani bisa tetap berproduksi sepanjang tahun. Kementerian Pertanian RI tentunya siap memberikan dukungan dan bantuan kepada petani ataupun kelompok tani agar produksi pangan terus meningkat agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan akibat krisis perubahan iklim yang terjadi di seluruh negara. **(Ant/H-45)*****

Title	Plt Bupati Sidak 120 Hektar Sawah Desa Kupang Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Pojok Kiri	
Page	6	
Author	Khol/Dy	



Plt Bupati Sidoarjo, H Subandi SH, M.Kn saat Sidak lahan sawah kekeringan di desa Kupang Jabon.

Plt Bupati Sidak 120 Hektar Sawah Desa Kupang Kekeringan

Sidoarjo, Pojok Kiri

Lahan pertanian Desa Kupang, Jabon seluas 120 Hektar mengalami kekeringan. Para petani mengeluh, karena padi siap tanam terancam mati. Permasalahan petani ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena jika terjadi gagal panen, stabilitas ketahanan pangan bisa terganggu.

Merespon keluhan petani Desa Kupang, Plt. Bupati Sidoarjo Subandi Siang tadi (4/6) langsung melakukan sidak, didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Asisten Administrasi Perencanaan dan Pengu-

nan Makmud serta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Eni Rustianingsih.

Setelah melihat langsung kondisi lahan pertanian tersebut, Ia segera mengkoordinasikan dengan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, meminta Kepala UPT Air dan jalan yang ada di kecamatan untuk pengaturan pembagian irigasi yang baik, untuk lahan yang kering dulu difokuskan, agar pembagian air tidak sampai menjadi persoalan.

"Kasihani petani, memasuki musim tanam tapi tidak bisa menanam padi karena terkendala pengairan

lahan pertanian," jelasnya.

Menurut Subandi, memang memasuki musim kemarau mempengaruhi debit air sungai yang biasa mengaliri sawah Desa Kupang. Akibatnya pembagian air irigasi dari sungai Mangetan Kanal Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik kurang optimal.

Pemerintah daerah akan berupaya memberikan bantuan pompa air sekaligus BBM nya. Selain itu, juga akan berupaya untuk memfungsikan kembali rumah pompa air peninggalan Belanda yang ada di Jabon.

"Kita akan perintahkan PU (Dinas PU Bina Marga

dan SDA Sidoarjo) untuk audiensi ke Kementerian Pertanian dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU PR di Jakarta. Karena kita perlu ijin agar pintu air yang ada pompa besar di Jabon itu bisa kita fungsikan kembali untuk menambah debit air yang ada di daerah Jabon," ujarnya

Sementara itu Kepala Desa Kupang Mukhamad mengatakan terdapat 190 hektar lahan persawahan di desanya. Dari seluruh luas lahan tersebut, 120 hektarnya mengalami kekurangan air. Akibatnya bibit padi siap tanam terancam mati bila

sawah segera tidak dialiri.

"Kondisi Ini sudah sepuluh hari berlangsung. Pihak desa sudah menyampaikan ke dinas terkait. Namun harus tetap menunggu jadwal gilir air," ucapnya.

Mukhamad sangat berharap air irigasi segera masuk kepersawahan desanya sesuai jadwalnya. Dengan begitu bibit padi yang berusia 15 sampai 20 hari dapat segera ditaman. Kondisi persawahan Desa Kupang ini sudah emergency, mohon pemerintah daerah dan dinas terkait segera membantu mengatasi kekeringan lahan ini. (Khol/Dy)

Title	Syamsir Rahman Datangkan Bantuan Kementan untuk 16 Ribu Hektare Lebih	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	6	
Author	Roy	



Syamsir Rahman Datangkan Bantuan Kementan untuk 16 Ribu Hektare Lebih

PENJABAT Bupati Tanahlaut, H Syamsir Rahman bertekad memperkuat sektor pertanian. Langkah-langkah strategis pun langsung ia lakukan sejak mengemban amanah memimpin Tanahlaut pada pertengahan September 2023.

Hal melegakan pun mengalir ke Tanahlaut, di antaranya kesuksesan Syamsir menyakutkan Kementerian Pertanian, sehingga daerah ini mendapat bantuan optimalisasi lahan rawa dengan cakupan seluas 16.913 hektare.

Itu merupakan alokasi bantuan terbesar kedua di Kalsel. Syamsir mengatakan, alokasi bantuan tersebut tetap tidak melupakan kecamatan lainnya, seperti Kintap yang mendapatkan 250 hektare, dengan 50 hektare di antaranya khusus untuk Desa Mekarsari.

Hal itu ia sampaikan Syamsir saat melakukan panen raya sekaligus tanam bibit milik Kelompok Tani (Poktan) Bunga Padi sekaligus temu lapangan bersama mayoritas para petani warga Desa Mekarsari, Rabu (5/6).



PANEN RAYA - Pj Bupati Tanahlaut, H Syamsir Rahman melakukan panen raya sekaligus sekaligus temu lapangan bersama mayoritas para petani warga Desa Mekarsari Kecamatan Kintap, Rabu (5/6).

"Bantuan langsung dari Kementan ini nantinya dikelola swadaya tiap poktan.

Saya berpesan, jaga dan kelola bantuan ini dengan baik," ucap Syamsir.

Realisasi bantuan tersebut nantinya berupa pembangunan pintu-pintu air hingga pembuatan tanggul untuk mengontrol keluar masuk arus air di area lahan pertanian. (roy/*)

Tittle	Banten Kekurangan 46 Ribu Hewan Kurba	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Tangsel Pos	
Page	8	
Author	Mpd/bnn	

Banten Kekurangan 46 Ribu Hewan Kurban

SERANG-Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah, Banten mengalami kekurangan pada pasokan hewan kurban untuk kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, kekurangan jumlah hewan kurban tersebut dikarenakan pada tahun ini Banten mengalami peningkatan kebutuhan hewan kurban.

Ia mengungkapkan, saat ini kebutuhan hewan kurban di Banten mencapai 86.880 ekor, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 78.484 ekor.

"Ada kenaikan sekitar 10 persen dari tahun lalu. Namun, jumlah hewan yang tersedia saat ini di Banten hanya sekitar 40.505 ekor hewan. Dengan rincian 4.856 ekor sapi, 429 ekor kerbau, 20.790 ekor kambing, dan 14.430 ekor domba," kata Agus kepada wartawan, Rabu (5/6).

"Masih kurang 46.375 ekor lagi, dengan rincian sapi potong sebanyak 18.813 ekor, kerbau 626 ekor, kambing 9.641 ekor, dan domba sebanyak 17.296 ekor," tambahnya.

Agus mengatakan, untuk dapat menutupi kekurangan jumlah tersebut, pihaknya akan men-

datangkan hewan kurban dari luar Banten, seperti Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Barat.

"Kita upayakan agar kebutuhan hewan kurban di Banten dapat terpenuhi. Seperti sapi kita bisa datangkan dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat. Tapi untuk kambing dan domba itu dominan kita datangkan dari Jawa Barat," jelasnya.

Agus juga menuturkan, hewan-hewan yang didatangkan ke Banten akan dilakukan sejumlah prosedur langkah pemeriksaan

secara ketat untuk memastikan bahwa kesehatan hewan-hewan tersebut dalam keadaan baik dan sehat.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan hewan kurban di sejumlah titik, seperti di Merak untuk hewan yang berasal dari Sumatera, dan di Gunung Sindur, Jawa Barat untuk hewan yang berasal dari pulau Jawa dan NTB. Selain itu, Agus juga menerangkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap lapak-lapak yang menjual hewan kurban yang saat ini bertebaran di jalan-jalan di wilayah Provinsi Banten.

"Karena kita perlu memastikan bahwa hewan kurban yang beredar di Banten memiliki kriteria ASUH atau Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Prinsipnya adalah agar masyarakat mendapatkan hewan kurban yang sesuai dengan syariat dan memenuhi kesehatan secara medis," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Dinas Pertanian Provinsi Banten Ari Mardiana menerangkan, hewan-hewan yang datang dari luar Banten dan di ada di lapak-lapak penjualan, akan diperiksa kesehatannya. Ari mengatakan, saat ini Dinas Perta-

nian Provinsi Banten telah mempersiapkan tim monitoring yang akan bergerak untuk melakukan pengecekan tersebut.

"Ini kita lakukan untukantisipasi adanya penyakit pada hewan tersebut, seperti zoonosis baik penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun LSD terhadap hewan kurban yang berasal dari wilayah wabah," kata Ari.

"Kita ingin memastikan agar hewan kurban yang ada di Banten semuanya dalam keadaan aman. Sehingga masyarakat yang membeli hewan kurban itu juga merasa aman dan nyaman," imbuhnya. (mpd/bnn)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Tittle	Cegah Spekulasi, Satgas Pangan Pantau Gudang dan Distributor Beras	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	9 Part 1	
Author	Iis	

Cegah Spekulasi, Satgas Pangan Pantau Gudang dan Distributor Beras

MARTAPURA, BPOST - Pedagang Beras di Pasar Martapura, Fandi menjelaskan bahwa harga beras premium belum naik.

Pria yang sudah lima tahun menjadi pedagang beras di Pasar Taibah Martapura itu mengaku juga tidak bakalan menaikkan harga beras premium karena dia mengambil dari Banjarmasin dengan harga yang sudah standar.

"Lopo ljo saja saya jual Rp 14.700, belum ke Rp 15.700," kata Fandi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Bahan Po-

kok Penting (Bapokting) DKUMPP Banjar, Hj Elok Yuli Suriyanti, Rabu (5/6) menjelaskan, sebenarnya harga beras baik premium atau medium itu naik sejak satu tahun terakhir.

"Memang ada kenaikan dari 30 sampai 70 persen dan itu disebabkan tahun kemarin di beberapa daerah gagal panen karena padi local terserang penyakit (hama)," kata Elok Yuli Suriyanti.

Apakah ada rencana gelar pasar murah? Me-

● Hal 11 kol 4-7

Title	Cegah Spekulasi, Satgas Pangan Pantau Gudang dan Distributor Beras	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	9 Part 2	
Author	lis	

Cegah Spekulasi...

● Sambungan Hal 9

mang pihak Pemkab Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan melaksanakannya bila diperlukan.

"Untuk saat ini harga beras baik lokal ataupun nonlokal (beras Jawa) di pasaran su-

dah stabil tinggi. Itu sudah berlangsung beberapa bulan bahkan sudah tahunan sehingga masyarakat terbiasa dan tidak ada gejolak dengan harga tersebut," urainya.

Adapun mencegah spekulasi memanfaatkan situasi seperti ini. Tim Satgas Pangan selalu memantau ke gudang dan pabrik hingga distributor agar tidak ada monopoli penumpukan yang mengakibatkan kelangkaan barang di pasaran. (lis)



BANJARMASIN POST/NURHOLIS HUDA

LAYANI PEMBELI - Pedagang beras di Martapura siap melayani pembeli, Rabu (5/6).

Titlle	Jalan Rusak, Harga Gabah-Jagung Tak Layak	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	10	
Author	An/zuk	

Jalan Rusak, Harga Gabah-Jagung Tak Layak

BONE, FAJAR — Bone salah satu daerah dengan kerusakan jalan cukup parah. Mirisnya ini terjadi selama puluhan tahun.

Kondisi ini berdampak ke kawasan-kawasan produksi dan pangan. Para petani yang seyogiannya membutuhkan mobilitas yang baik untuk mendistribusikan hasil bumi, harus gigit jari.

Seperti halnya di Desa Tungke Kecamatan Bengo, buruknya jalan berdampak signifikan terhadap harga gabah dan jagung yang diproduksi petani. Para pembeli dan pengepul enggan membayar harga yang pantas akibat sulitnya akses mobil ke desa mereka.

"Begitu *mami*, terpaksa kami jual murah, daripada kami tidak makan," keluh Muh Awaluddin, salah seorang petani, kemarin.

Sementara untuk membawa hasil bumi ke luar daerah, petani membutuhkan usaha lebih. Penyediaan angkutan harus berjibaku dengan kondisi jalan yang tidak bersahabat.

"Mau dibawa ke luar juga jangan sampai kenapa-kenapa *jaki* juga," tandasnya.

Akses jalan yang dihuni ribuan jiwa ini telah dilaporkan



ASHARI PN/FAJAR

BERLUMPUR. Kondisi jalan di Desa Tungke dan Desa Selli Bone, Rabu, 5 Juni. Jalan rusak ini terakhir diperbaiki 32 tahun lalu.

rusak sepanjang 4,5 km dan terlihat bak kubangan. Warga Desa Selli, Salam mengaku cukup kecewa dengan kinerja pemerintah.

Dirinya beserta ribuan warga lainnya telah cukup bersabar hingga 32 tahun lamanya. "Bagaimana kita tidak kecewa tidak pernah diperbaiki memang, ini bagus-jji 32 tahun lalu," ketusnya.

Pengerasan hanya dilakukan sekali saja pada 1992. Pernah diaspal, namun ini hanya di satu titik saja, 300-an meter di sekitar rumah

warga. Aspal tidak dimulai dari batas desa melainkan di bagian tengah.

Sebelumnya terkait maraknya akses rusak ke desa, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin mengaku cukup sulit untuk membenahi jalan-jalan Bone yang panjangnya mencapai 1.601,341 km, bahkan menjadi salah satu kabupaten terluas di Sulsel.

Bone membutuhkan anggaran hingga triliunan untuk membenahi jalan-jalan ini. "Jadi ini memang sangat berat," teranginya. **(an/zuk)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Kodim Hidupkan Lahan Tidur untuk Kembangkan IM Jagong	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Serambi Indonesia	
Page	13	
Author	Mad	



SERAMBI/RAHMAD WIGUNA

TANAM JAGONG PERDANA - Dandim 0117/Atam, Letkol Inf Andi Ariyanto bersama Pj Bupati Aceh Tamiang, Asra saat menanam perdana jagong, Rabu (5/6/2024). Program IM Jagong ini dikembangkan di lahan tidur seluas 4 hektare.

Kodim Hidupkan Lahan Tidur untuk Kembangkan IM Jagong

KUALASIMPANG - Kodim 0117/Atam menjadikan lahan tidur eks HGU kebun kelapa sawit sebagai pusat pengembangan jagong. Program IM Jagong ini ditargetkan menghasilkan produksi jagong minimal 8 ton.

Tanam perdana jagong IM Jagong ini dilakukan langsung Dandim 0117/Atam, Letkol Inf Andi Ariyanto bersama Pj Bupati Aceh Tamiang, Asra dan unsur Forkopmda, Rabu (5/6/2024). Bibit jagong ini ditanam di lahan eks HGU perkebunan kelapa sawit seluas 4 hektare. "Kita targetkan menghasilkan 8 ton per hektare,

bila ini dikerjakan bersama-sama, kami yakin tercapai," kata Andi.

Ditekankan kalau kegiatan ini merupakan program unggulan TNI AD karena perintah langsung Panglima TNI, KSAD hingga Pangdam. TNI bersama Kementerian Pertanian telah berkomitmen mengambil peran meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. "Ini bukan hanya perintah, tapi niat dan inovasi TNI AD dalam membantu Pemda dalam meningkatkan ketahanan pangan," katanya.

Andi berharap program

ini bisa diikuti masyarakat sehingga tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. "Ini bagian dari Oplah (optimalisasi lahan) pertanian, termasuk di antaranya meningkatkan produksi padi, di mana sawah kita masih tadah hujan," ungkapnya.

Pj Bupati Aceh Tamiang, Asra menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah bersedia membantu ketahanan pangan dengan membuka lahan jagong. Dia optimis program ini berjalan lancar karena diniatkan untuk rakyat.

"Ini kehendak Allah SWT,

kemarin lahan ini dikelurkan HGU-nya, batang sawit kita ambil untuk membuat krib tanggul di Seruway. Kita belum berpikir nantinya akan dijadikan apa lahan ini, Alhamdulillah, TNI bersedia menanam jagong di sini," kata Asra.

Lokasi IM Jagong ini, dinalai Asra, sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya Medan-Banda Aceh. Artinya, lahan ini dengan mudah dilihat masyarakat dengan harapan ditiru. "Lahan tidur ini banyak, kalau dlu-rus akan luar biasa. Program seperti ini akan kita galakkan terus," ujarnya. (mad)

Title	Pemprov Gelar Pasar Murah Antisipasi Kenaikan Harga	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Tribun Medan	
Page	9	
Author	C14	



PASAR MURAH - Sejumlah warga mengantre untuk membeli sembako di pasar murah di Medan, beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Pemprov Gelar Pasar Murah Antisipasi Kenaikan Harga

MEDAN, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Mulyadi Simatupang mengatakan, pihaknya menjamin pasokan kebutuhan aman di Sumut.

"Ya biasanya, kenaikan harga bahan pokok itu di hari besar keagamaan termasuk ini nanti Idul Adha. Itu biasanya, daging kemudian ayam broiler, telur, sementara untuk beras, cabai ini masih memenuhi, karena kita juga menghasilkan komoditi tersebut," ucap Mulyadi, Rabu (6/6).

Mulyadi mengungkapkan, pihaknya akan melakukan langkah antisipasi berupa pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok. Bersama stakeholder terkait hingga melakukan operasi pasar murah, untuk menekan harga komoditas yang naik.

"Kalau pasar murah selalu ada, karena memang hal seperti itu, kita melihat gejolak di masyarakat dari pantauan kita setiap hari. Kita juga bisa pantau pasar setiap hari, jadi kita bisa tahu harga-harga di atas eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah," jelas Mulyadi.

Mulyadi mengungkapkan bahwa ada sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan seperti bawang merah, dan bawang putih. Tapi, sudah distapakan anti-

stipasi hingga intervensi harga, kembali normal.

"Jadi untuk saat ini itu baru bawang merah dan putih yang sedikit melonjak, karena pasokan dari luar terganggu. Kemudian gula juga kita masih impor, kalau pun ada itu dari Jawa, tapi kalau cabai, beras, minyak goreng itu harga masih stabil," tutur Mulyadi.

Penyebabnya, kata Mulyadi, di Pulau Jawa kondisi panen agak terganggu, sehingga pasokan berkurang.

"Sementara bawang merah dari kita juga belum bisa memenuhi pasar di Sumut, ini biasanya yang membuat terganggu," ucapnya.

Mulyadi mengimbau masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran Idul Adha, sesuai dengan kebutuhan dan jangan berbelanja berlebihan.

Termasuk, Mulyadi menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan produsen hingga distributor bahan pokok, jangan momentum Hari Raya Idul Adha, menaikkan harga dan mempermainkan harga kebutuhan pokok, dengan mencari keuntungan besar.

"Kita koordinasi juga sama mitra-mitra kerja kita, produsen-produsen bahan pokok, kita melakukan pantauan pasar juga, kita coba memutus rantai spekulasi-spekulasi, kita selalu koordinasi dengan pertanian juga," pungkasnya. (cr14)

Title	Pengusaha Pilih Kirim Sapi Pakai Kargo	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	9 Part 1	
Author	Wie	



PERIKSA GIGI - Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin melakukan pemeriksaan gigi hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Basirih, Rabu (5/6).

Pengusaha Pilih Kirim Sapi Pakai Kargo

■ DKP3 Kota Banjarmasin Periksa Kesehatan Hewan Kurban

BANJARMASIN, BPOST - Harga sapi di Kota Banjarmasin untuk sapi kurban tahun ini dipastikan naik sebesar Rp 5 ribu per kilogram. Jika tahun lalu harga sapi hanya Rp 70 ribu per kilogram. Tahun ini harga sapi hidup untuk kurban mencapai Rp 75 ribu per kilogram. Pengusaha sapi Banjarmasin, Hidayatullah menga-

takan harga sapi naik mengikuti biaya pengiriman. Ia terpaksa memilih jalur kargo ketimbang tol laut. Bukan tanpa alasan. Menurutnya, kargo persyaratannya lebih mudah ketimbang tol laut. Jika menggunakan tol laut, menurutnya syarat yang harus dilengkapi lebih

● Hal 11 kol 4-7

STORY HIGHLIGHTS

- Harga sapi tahun ini naik Rp 5.000 per kilogram
- Naiknya harga sapi mengikuti biaya pengiriman
- Biaya pengiriman lebih mahal karena menggunakan kargo

Title	Pengusaha Pilih Kirim Sapi Pakai Kargo	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	9 Part 2	
Author	Wie	

Pengusaha...

• Sambungan Hal 9

banyak lagi. Padahal, sapi yang la datangkan sudah memiliki persyaratan sehat. "Kalau kargo lebih mudah. Tapi lebih mahal," ujarnya saat ditemui di RPH Basirih, Rabu (5/6).

Ia mengatakan untuk sapi di Banjarmasin masih aman. Sebab, ia mendapat jatah 500 ekor. Pun dengan tahun ini. Hanya saja, memang diakutnya, untuk ke Kalimantan Selatan jumlah sapi dari luar pulau baik dari Kupang, Bali, dan Madura memang ada pengurangan.

"Untuk saya sih aman saja," ujarnya.

Sejauh ini sapi miliknya sudah dipesan oleh orang

lain. Sehingga, hanya tersisa sedikit saja lagi.

Untuk tahun ini sapi paling murah dibanderol dengan harga Rp 15 juta hingga Rp 35 juta untuk sapi Bali. Sedangkan sapi Madura dengan Rp 40 juta hingga Rp 45 juta.

Hidayatullah mengatakan, pihaknya memiliki sapi paling mahal dengan harga Rp 75 juta hingga Rp 80 juta. Sapi ini merupakan sapi jenis Madrisin. Alias campuran Madura dan Limosin.

"Kalau ini jumlahnya tidak banyak. Tadi laku satu dengan harga Rp 75 juta," katanya.

Mengapa mahal? Dijelaskannya, berat sapi ini lebih dari setengah ton. Alias di atas 500 kilogram. "Bahkan ada yang mencapai 600 kilo-

gram lebih," katanya.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin melakukan pemeriksaan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Basirih, Rabu (5/6).

Pemeriksaan ini dilakukan agar hewan kurban nanti pada Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah sehat dan layak konsumsi.

Kepala UPT Kepala UPT RPH Basirih, drh Annang Dwijatmiko membeberkan, menjelang Iduladha sudah ada masuk 159 ekor masuk. Rencananya akan ada 450 lagi yang masuk. 450 ekor ini masuk secara bertahap yakni 250 ekor dan nanti 200 ekor.

Ia menjelaskan, pemeriksaan pada sapi dilakukan

dengan cara memeriksa fisik sapi. "Kalau kami mengeceknya ante mortem. Mulai dari kepala sampai organ genitalnya. Termasuk adanya dugaan terkena penyakit kuku dan mulut. Sejauh ini sehat. Karena semua yang masuk harus disertai dengan keterangan sehat dari daerah asal sebelum dikirim," katanya.

Meski tidak ditemukan sapi yang sakit akibat virus atau lainnya. Tetapi ada juga sapi yang patah tulang kaki hingga meninggal akibat kelelahan.

"Kalau bisa dipotong ya dipotong. Memang kualitas dagingnya berbeda dengan yang sehat. Tapi masih aman konsumsi karena hanya kelelahan," pungkasnya. (wie)

Tittle	Petambak Kesulitan Pupuk	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Fajar Makasar	
Page	10	
Author	Man/zuk	

Petambak Kesulitan Pupuk

SENGKANG, FAJAR — Petani tambak di Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka sudah lama kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Bahkan, sulitnya mencari pupuk subsidi untuk tambak ikan dan udangnya sudah berlangsung lama. Itu sejak 2006 silam.

"Mulai dari saya bantu kelola empangnya orang tua, di sini tidak pernah dibantu pupuk subsidi untuk petambak," ujar Hamsa Mawar, salah seorang petambak di Manyili, Rabu, 5 Juni.

Kini, ia terpaksa mencari pupuk kepada petani padi yang memiliki pupuk lebih dengan belas kasih. Langkah tersebut dilakukan diakuinya melanggar aturan, namun sulitnya mencari pupuk memaksa melakukan itu semua. "Mau-mi diapa, terpaksa, karena tidak ada pupuk subsidi disediakan untuk petani tambak," keluhnya.

Ia pun berharap pemerintahan sekarang dapat mencari solusi dari permasalahan para petani tambak di Wajo. Supaya ke depannya tidak ada pelanggaran terjadi.

"Kalau bisa adakan pupuk untuk kami, meskipun subsidinya berbeda dengan petani sawah. Tidak usah melarang kami kalau ada petani siap membantu memberikan pupuknya karena sawahnya kekeringan," tandasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Wajo, Andi Ismirar Sentosa mengaku, penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani tambak hingga saat ini belum memiliki regulasi.

"Kami lagi mengajukan ke PT. Pupuk Kaltim wilayah Sulsel untuk mendapatkan penambahan pupuk subsidi untuk petani tambak. Karena petani tambak juga petani, sama petani padi," paparnya.

Ia pun berjanji, menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi bagi petani tambak tersebut.

(man/zuk)



Tittle	Kadin Kabupaten Bogor Siapkan 12 Tiket Umrah	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Warta Kota	
Page	8	
Author	Ron	

Kadin Kabupaten Bogor Siapkan 12 Tiket Umrah

► Di Gelaran Gebyar IMK-UMKM dan Jalan Sehat

Bogor, Warta Kota

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor menggelar Gebyar IMK-UMKM serta Jalan Sehat pada Sabtu (8/6/2024).

Dengan mengusung tema 'Babarengan, Akur, Makmur', kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dee Checawati, mengatakan kegiatan Jalan Sehat Kadin 2024 akan dimulai pukul 6.30 WIB hingga selesai di kawasan Stadion Pakansari-Cibinong.

"Gebyar IMK-UMKM dan Jalan Sehat Kadin ini merupakan rangkaian memeriahkan HJB ke-542 tahun. Rencananya peserta akan dilepas Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu," kata Shinta di Cibinong, Rabu (5/6/2024).

Dalam kegiatan ini Kadin menyediakan 15.000 tiket bagi masyarakat yang ingin mengikuti

Gebyar IMK-UMKM dan Jalan Sehat Kadin. "Peserta diperkirakan mencapai 15 ribu peserta. Itu jumlah tiket yang disiapkan panitia pelaksana," papar Sintha.

Dalam Gebyar IMK-UMKM Jalan Sehat Kadin 2024 ini, Kadin menyiapkan hadiah doorprize kepada para peserta, seperti 12 tiket umrah serta hadiah menarik lainnya.

"Jadi saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bogor, untuk ikut serta dalam memeriahkan Gebyar IMK-UMKM Jalan Sehat Kadin di momen HJB ke-542 Tahun," ucap Sintha.

Sementara itu, Saleh, warga Kecamatan Tajur Halang, mengaku antusias untuk ikut meramaikan kegiatan jalan Sehat Kadin ini.

"Saya pasti hadir. Kegiatan ini bagus untuk mengajak masyarakat berolahraga. Apalagi ada doorprize umroh. Mudah-mudahan saja, saya yang dapat," ungkapnya.

Lomba 'Nguseup Bareng'

Masih dalam rangkaian peringatan HJB ke-

542 Bogor, sebelumnya Kecamatan Sukaraja menggelar Lomba 'Nguseup Bareng' dan Kreasi Isi Piringku Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada Selasa (4/6/2024).

Bertempat di Fishing Valley Bogor, Sukaraja, ini kegiatan ini dibuka oleh Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu mengungkapkan nguseup bareng bukan hanya ajang ketangkasan memancing, tetapi juga momen kampanye menjaga kelestarian alam.

"Saya menyambut baik lomba 'Nguseup Bareng' dan kreasi isi piringku menu B2SA yang digelar dalam rangka memeriahkan HJB ke-542. Ini upaya menghargai sejarah Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal dan beristirahat sejak zaman dulu," ungkap Asmawa.

Dia menambahkan lomba kreasi isi piringku B2SA merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang panganekaragaman pangan. (ron)

Title	Pentingnya Wirausaha Muda Pertanian untuk Regenerasi	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Radar Banyumas	
Page	10	
Author	Radar Banyumas	

Pentingnya Wirausaha Muda Pertanian untuk Regenerasi

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempromosikan kewirausahaan muda di sektor pertanian, sebagai bagian dari upaya regenerasi petani. Generasi muda yang penuh tekad, kreativitas, dan inovasi memegang peran kunci dalam mengembangkan sektor ini.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementan aktif memberikan pendampingan kepada lulusan vokasi pertanian, seperti dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), dan SMKPP Negeri Sembawa.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, menekankan pentingnya pembinaan bagi wirausahawan muda. Dia berharap, langkah ini dapat menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidang pertanian.

“Apabila banyak generasi muda yang tergerak untuk mengembangkan usaha pertanian, dampaknya akan sangat positif. Ini akan menjadi modal penting bagi mereka dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya dalam mencapai swasembada pangan,” kata Dedi.

Lulusan program vokasi Kementan, dibina sebagai petani muda yang berperan dalam mengoptimalkan potensi pertanian lahan rawa di Muara Telang dan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Program pembinaan ini telah berjalan sejak Februari 2024.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan), Idha Widi Arsanti menyatakan, para lulusan vokasi Kementan ini berkontribusi dalam pengembangan pertanian modern di lahan rawa, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat setempat.

“Mereka juga mencari peluang bisnis lain di Banyuasin, didukung oleh program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) yang bekerja sama dengan petani untuk budidaya melon, jamur, itik, dan kambing,” tambah Idha.

Idha menjelaskan, PWMP bertujuan mendukung lulusan agar dapat mengembangkan usaha di lahan rawa, dan diharapkan dapat berkembang lebih jauh dengan mengajak petani milenial di sekitarnya. (*)



DOK JAWAPO.COM

INOVASI: Kewirausahaan muda untuk regenerasi petani sebagai modal penting mendukung perekonomian Indonesia, terutama dalam swasembada pangan.

Title	BUDI DAYA ANGGUR JOMBANG	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Neraca	



NERACA/Antarafoto/Syaiful Arit/loc

BUDI DAYA ANGGUR JOMBANG : Warga memetik anggur impor yang dibudi dayakan dalam green house di Desa Jenisgelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (5/6/2024). Menurut petani anggur dalam sekali panen bisa menghasilkan sekitar rata-rata 60 kilogram per pohon dan saat ini ada sebanyak 50 pohon anggur impor yang dibudi dayakannya dengan hanya mengandalkan pemesanan dari pasar lokal dengan harga Rp75 ribu-Rp100 ribu per kilogramnya.

Title	DKPP Jawa Barat Sebut Jumlah Hewan Kurban Meningkat 15 Persen	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

DKPP Jawa Barat Sebut Jumlah Hewan Kurban Meningkat 15 Persen

NERACA

Kota Bogor - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat menyebutkan jumlah hewan kurban di wilayahnya pada tahun 2024 diperkirakan meningkat 15 persen dibanding tahun 2023.

Kepala DKPP Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana di Kota Bogor, Senin (3/6), menyebutkan pada 2023 jumlah hewan kurban yang dipotong sebanyak 316.265 ekor hewan, dengan rincian, 97.237 ekor sapi, 803 ekor kerbau, 172.440 ekor domba dan 45.785 ekor kambing.

"Pada tahun ini diperkirakan ada kenaikan sebesar 15 persen untuk semua hewan kurban yang dipotong. Mudah-mudahan terealisasi karena hasil monitoring kami ke lapangan permintaan hewan kurban masih terus terlaksana," jelasnya.

Di samping itu, Arifin menyampaikan bahwa penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda hewan ternak di Indonesia sekitar dua tahun lalu, saat ini sudah terkendali.

Ia mengatakan DKPP Provinsi Jawa Barat memiliki Tim Penyakit Menular Strategis yang memantau seluruh isu penyakit menular pada hewan.

"Di kita Jawa Barat itu kondisinya aman, hanya PMK saja. Kemarin juga ada LSD (lato-lato), tetapi sudah terkendali karena vaksin dan pengobatan tetap kita lanjutkan," ucapnya.

Untuk memastikan hewan kurban di wilayahnya dalam keadaan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), pihaknya menerjunkan 5.000 orang pemeriksa hewan yang disebar di 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.

Arifin menyebutkan tim pemeriksa hewan kurban ini terdiri atas 1.300 petugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kota/kabupaten, serta 4.000 orang mahasiswa, dokter hewan dan akademisi.

"Kami juga sudah melakukan pelatihan Juru Penjual Hewan melalui daring dan luring. Ada hampir 500 orang yang sudah mengikuti pelatihan ini," ujarnya. ● ant

Title	DPRD Jabar Siap Masukkan Masalah Air dalam Perda Pertanian Organik	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

DPRD Jabar Siap Masukkan Masalah Air dalam Perda Pertanian Organik

Garut - Panitia Khusus (Pansus) 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan siap memasukkan masalah pengadaan air dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik sesuai aspirasi kelompok tani organik dari Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

■ NERACA

"Nanti dimasukkan pasal terkait dengan masalah di sini ya, sarana prasarana dan sumber pengairan, jadi infrastruktur irigasi itu harus masuk di salah satu pasal di Raperda itu, untuk menyelamatkan pertanian organik," kata Wakil Ketua Pansus 5 DPRD Jabar Enjang Tedi saat kunjungan kerja pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pertanian Organik dengan Kelompok Tani Ciawitali, Kecamatan Cilawu, Garut, dikutip Antara, kemarin.

Enjang menuturkan saat ini DPRD Jabar sedang melakukan tahapan penerbitan Perda Penyelenggaraan Pertanian Organik untuk membantu petani,

menyelamatkan lingkungan, dan juga meningkatkan produktivitas pertanian yang berkualitas.

Dalam kunjungan kerja Pansus 5 ini, kata dia, mendengarkan berbagai persoalan dari kelompok tani yang selama ini intens dalam mengelola lahan pertanian organik di Kampung Ciawitali, Desa Mangkurakyat.

"Kesadaran masyarakat Ciawitali sangat tinggi untuk beralih pertanian konvensional ke pertanian organik ini, tapi ternyata ada kendala utama di sini yang justru kendala harus menjadi pendukung pertama yakni sumber pengairan yang tersumbat," katanya.

Ia menyampaikan, dalam pertemuan dengan

petani di Garut itu mendapatkan masukan yaitu mengatasi persoalan pengadaan air untuk memenuhi kebutuhan areal pertanian organik di desa tersebut agar produktivitas padi tidak turun.

Adanya perda tersebut, kata dia, dapat menjadi dasar hukum untuk menjaga pengairan lahan pertanian organik di Garut maupun daerah lainnya agar lahan tersebut terus produktif, dan diharapkan semakin luas.

"Perda ini harus menjadi payung hukum penyelenggaraan pertanian organik, dan pertanian organik itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Pertanian saja, atau di tingkat provinsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, tapi pengairan itu sektornya adalah Dinas PUPR, jadi harus ada kerja sama untuk penyelesaiannya," kata Enjang.

Ia menyampaikan perda tersebut ditargetkan selesai 24 Juni 2024 yang sebelumnya akan melalui proses evaluasi di Kemendagri agar tidak ada aturan

yang bertentangan dengan peraturan sebelumnya, untuk selanjutnya disahkan.

Ia berharap setelah terbitnya perda tersebut bisa secepatnya memberikan manfaat bagi petani, khususnya petani organik di Garut dalam mengatasi persoalan pengairan lahan pertanian.

"Kebertahanan pertanian di Jawa Barat itu kan perlu ada payung hukumnya, perlu ada perlindungannya gitu, jadi perlu perlindungan lahan. Nanti kita berharap ada pasal terkait dengan forum pertanian organik yang melibatkan lintas-lintas dinas," katanya.

Ketua Kelompok Tani Ciawitali Ade Ahmad mengatakan lahan pertanian organik yang dikelola kelompoknya seluas 21,6 hektare dan sudah bersertifikat sebagai padi organik.

Ia berharap adanya pertemuan dengan anggota DPRD Jabar dan dinas terkait dapat secepatnya menyelesaikan masalah pengairan untuk lahan pertanian yang selama ini tersumbat. ● ant

Tittle	Inflasi Kota Tangerang Mei Disebut Terbaik dalam Tiga Bulan Terakhir	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Inflasi Kota Tangerang Mei Disebut Terbaik dalam Tiga Bulan Terakhir

NERACA

Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang Banten menyebutkan inflasi pada Mei berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di angka 2,95 persen atau dinilai sebagai yang terbaik dalam tiga bulan terakhir.

"Indeks inflasi bulan ini menjadi catatan yang sangat positif untuk perekonomian lokal di Kota Tangerang. Terlebih, berdasarkan perhitungan 'month to month' dan 'year to date', tingkat inflasi keduanya sebesar -0,47 persen dan 1,36 persen," kata Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tangerang, Yeti Rohaeti di Tangerang, Selasa (4/6).

Ia menjelaskan indeks inflasi Kota Tangerang selama tiga terakhir yakni Maret di angka 3,62 persen, April di angka 3,36 persen dan dan Mei kembali turun mencapai 2,95 persen. ● ant

Tittle	Jasindo dan PT Pos Indonesia Kerjasama Tingkatkan Layanan Polis Tani dan Ternak	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	5	
Author	Bari	

Jasindo dan PT Pos Indonesia Kerjasama Tingkatkan Layanan Polis Tani dan Ternak

NERACA

Jakarta - PT Asuransi Jasindo dan PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat distribusi polis serta dana klaim asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) tahun anggaran 2024.

Direktur Pengembangan Bisnis Asuransi Jasindo Diwe Novara dalam keterangannya yang diterima, menyatakan kolaborasi tersebut merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta program asuransi pertanian dan peternakan. "Dengan kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa petani penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, baik dalam hal pengiriman polis maupun penyaluran dana klaim," ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, ia menuturkan bahwa polis AUTP dan AUTS/K akan langsung diterima oleh petani sebagai pemegang polis. Selama ini, dana klaim dikirim ke rekening kelompok tani, yang kerap menimbulkan kendala penyaluran.

Diwe mengatakan bahwa pihaknya pun berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran petani akan kepemilikan asuransi lahan pertanian mereka. Ia juga berharap kerja sama dengan Pos Indonesia tersebut dapat semakin memperluas jangkauan program asuransi pertanian dan peternakan yang ditawarkan Jasindo di seluruh Indonesia.  bari

Title	PENJUALAN BIBIT TEMBAKAU	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Neraca	



NERACA/Anwarfoto/Muhammad Mada/foc

PENJUALAN BIBIT TEMBAKAU : Petani menyiram bibit tembakau di Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (5/6/2024). Memasuki musim tanam di awal kemarau, penjualan bibit tembakau di kawasan itu meningkat sekitar 50 persen dari sebelumnya yakni mencapai 1 juta pohon dalam dua minggu terakhir dengan harga Rp50 ribu - Rp60 ribu per seribu pohon.

Title	PRODUKSI PADI SULAWESI TENGGARA	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Neraca	



PRODUKSI PADI SULAWESI TENGGARA : Sejumlah petani mengemas padi hasil panen dengan karung di Desa Cialam, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/6/2024). Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distannak) Sulawesi Tenggara mendata produksi padi di daerah itu periode Januari sampai Mei 2024 sebanyak 186.888 ton yaitu meningkat dibanding periode Januari hingga Mei 2023 sebanyak 138.314 ton.

Title	Tingkatkan Produksi, Program Pompanisasi Dipastikan Berjalan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro	

Tingkatkan Produksi, Program Pompanisasi Dipastikan Berjalan

NERACA

Sukabumi - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan program pompanisasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berjalan dengan sangat baik. Sebagai langkah nyata, saat ini pemerintah terus menargetkan perluasan areal tanam (PAT) hingga 6.522 hektar (ha).

Seperti diketahui, pompanisasi di Sukabumi tersebar di 17 Kecamatan. Di antaranya ada di Kecamatan Ciemas, Cibitung, Cidadak hingga wilayah pesisir Palabuhanratu. Sementara program pompa di Jawa Barat terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Saat ini di Kecamatan Ciemas ada sekitar 45 ha yang terus diairi dan masih akan bertambah ke titik-titik lainnya. Jadi saya melihat progresnya sudah berjalan dengan sangat baik," ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil saat meninjau langsung program pompanisasi di Sukabumi.

Ali mengatakan, rata-rata indeks pertanaman di Kecamatan Ciemas baru satu kali dalam setahun. Namun berkat pompa, progres pertanaman semakin membaik dan mengarah pada 3 kali dalam setahun. Hal ini karena pemerintah terus memperkuat bibit, benih hingga pupuk yang

naik 100 persen. "Tadinya IP-nya baru 1 kali dalam setahun artinya satu kali tanam setahun. Nah berkat dengan adanya program Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian semua ada potensi untuk meningkatkan indeks pertanaman padi pada lahan sawah tadah hujan di Sukabumi," kata Ali. Menurut Ali, perluasan areal tanam di Indonesia ditargetkan mencapai 1 juta ha untuk mengejar ketertinggalan produksi yang sempat menurun akibat el nino dan juga perubahan cuaca. Target tersebut semakin terlihat mengingat pemerintah terus menambah pompa dan juga alokasi pupuk hingga 9,55 juta ton.

"Kita harapkan antara bulan Agustus atau September mendatang kita sudah panen raya. Kami yakin program pompa yang dibantu langsung jajaran TNI dapat berjalan dengan optimal," jelas Ali.

Sebagai informasi, PAT adalah instruksi Menteri Pertanian melalui Kepmentan No. 243/2024 tentang Satgas Antisipasi Darurat Pangan untuk melakukan pertambahan areal tanam, khususnya di kabupaten Sukabumi, melalui pompanisasi dan penanaman padi gogo dalam rangka menghadapi musim kemarau panjang. Adapun potensi sawah tadah hujan (STH) di Kabupaten Sukabumi

mencapai 17.599 ha dan sudah terealisasi 30,16 persen atau seluas 5.307,86 ha/30 Mei 2024.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong perluasan areal tanam dan juga progres pompanisasi sebagai solusi cepat masa depan bangsa dalam menghadapi musim kering sesuai prediksi BMKG. "Kami mendorong sepenuhnya pompanisasi untuk peningkatan produksi dan perluasan areal tanam," janji Amran.

Amran pun mengharapkan semua pompa bisa cepat terpasang. "Kalau sudah terpasang semua, saya akan berkunjung lagi," janji Amran. Amran pun mengungkapkan, pompanisasi bisa meningkatkan produksi antara tiga hingga empat juta ton. Jika produksi bisa meningkat, ia meyakini pendapatan petani juga bisa turut meningkat. "Ini yang kita harapkan, produksi meningkat, pendapatan petani bertambah, dan NTP pun ikut naik," ungkap Amran.

Sebelumnya, Amran mengaku optimis program pompanisasi bisa memacu aktivitas tanam di musim kedua tahun ini agar berjalan lebih cepat dan maksimal. Amran menuturkan program pompanisasi ini dikonsentrasikan untuk lahan sawah yang indeks pertanamannya (IP) satu na-

mun memiliki sumber air yang tersedia sepanjang tahun. Artinya lahan-lahan sawah tersebut hanya mampu tanam satu kali dalam setahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya hanya satu menjadi dua atau lebih dalam setahun.

"Kita sudah identifikasi ada 300.000 hektar, lahan yang IP satu, kita angkat menjadi dua atau tiga. Kalau kita angkat IP nya dua kali saja, produksi 5 ton, berarti itu bisa 1.000.000 tambahan bisa dari Jawa Tengah, ini bisa jadi potensi luar biasa, dan kami siapkan pompa, inilah solusi cepat untuk menangani pangan" terang Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan pompanisasi dapat membantu aktivitas tanam petani dilapangan. Petani akan lebih mudah dan cepat melakukan olah tanah dan tanam. Tidak hanya Pulau Jawa, program ini akan diperluas hingga wilayah lain diluar Pulau Jawa, agar upaya peningkatan produksi padi berjalan secara massif.

"Kami rancang, Pulau Jawa minimal 500.000 ha, itu minimal, jadi kami fokus Jawa, karena Jawa rentang kendalanya dekat, 70 persen produksi juga di Jawa, sehingga langsung kami sentuh Jawa dulu, kemudian luar Jawa juga kami target 500.000 ha" ungkap Amran. @gro